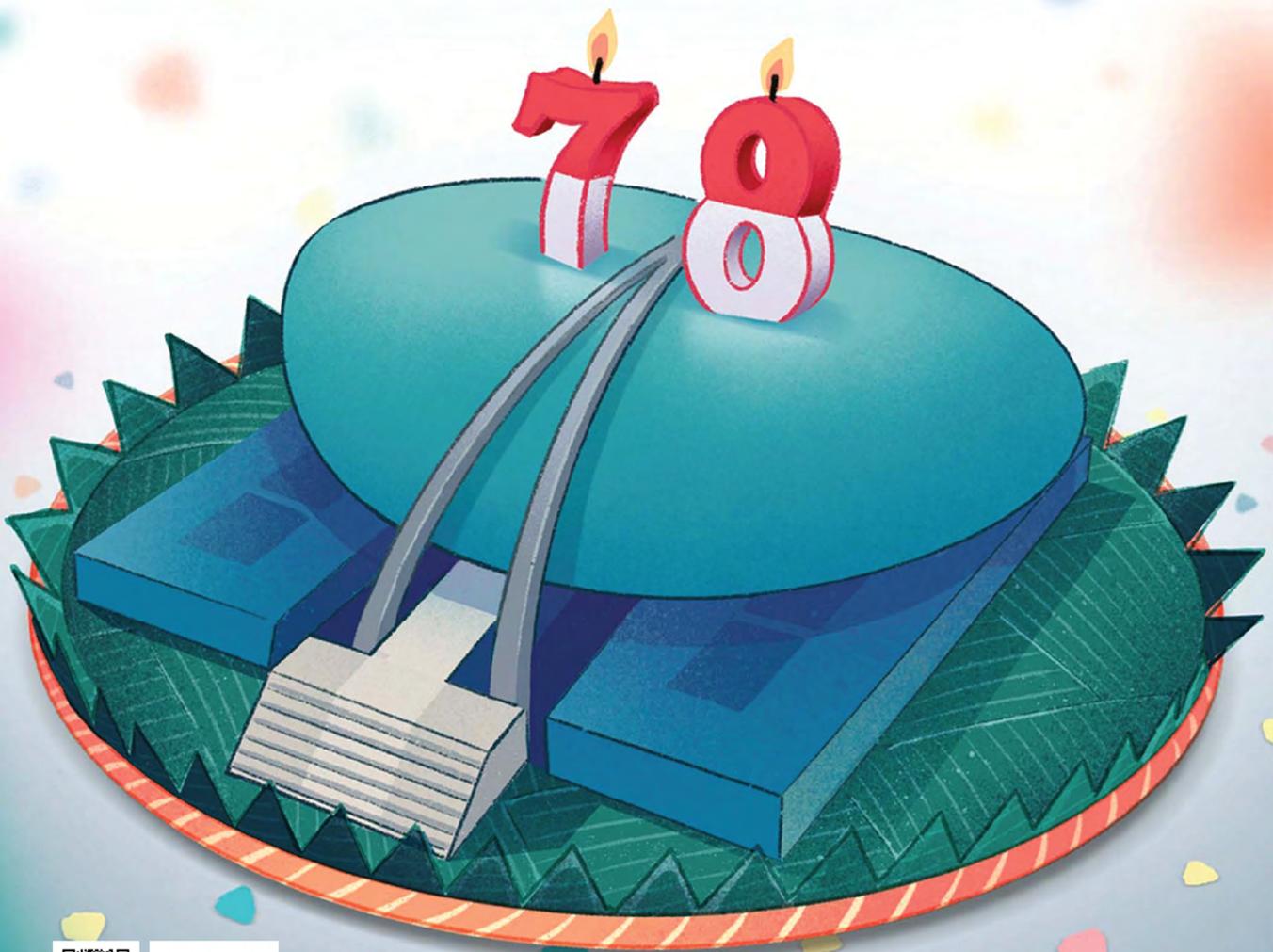




MAJALAH

# Parlementaria

## 78 Tahun DPR RI bersama Rakyat



EDISI 225  
TH. 2023



7 25272 73070 6





# Parlementaria

## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

## PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

## PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

## W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

## REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega, Agung Hidayat, Ridwan Budiman

## REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

## SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

## ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

## FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldí Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

## ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

## INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

## ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

## LAPORAN UTAMA

# 78 Tahun DPR RI Bersama Rakyat

4

**4 PROLOG**  
APBN 2024 Berbasis Kesejahteraan

**8 LAPORAN UTAMA**  
● Menjaga Stabilitas Anggaran Pasca Covid-19  
● Mengoptimalkan Semua Fungsi DPR RI  
● HUT DPR RI Jadi Ajang Otokritik Parlemen  
● Sambut HUT DPR Melalui Perbaikan RUU ITE

**16 SUMBANG SARAN**  
Kesiapan DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju

**18 PENGAWASAN**  
Menghukum Oknum Paspampres

**20 ANGGARAN**  
Menilik Amunisi Mewujudkan SDM Unggul 2024

**22 LEGISLASI**  
Revisi UU Desa  
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

**24 FOTO BERITA**

**28 FOTO STORY**  
Polusi Udara Kepung Jakarta dan Sekitarnya

**30 PROFIL**  
M. Nasim Khan  
Politisi Religius dari Situbondo

**34 KUNKER**



PENGAWASAN

Menghukum  
Oknum Paspampres

18

ANGGARAN

Menilik Amunisi  
Mewujudkan SDM  
Unggul 2024

20

LEGISLASI

Revisi UU Desa  
Mewujudkan  
Kesejahteraan  
Masyarakat

22

- 56** **SOROTAN**  
Polusi Udara  
DPR Wacanakan Pembentukan Pansus
- 58** **LIPUTAN KHUSUS**  
Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju
- 60** **DAPIL**
- 70** **TOKOH**  
JJ RIZAL  
Masa Depan Adalah Negeri Yang Tak Memiliki Peta
- 72** **PERNIK**  
POR DPR RI  
Menjaring Bibit Baru Olahraga
- 74** **KIAT SEHAT**  
Menjaga Kesehatan Tubuh dari Polusi
- 76** **WISATA**  
Rumah Orang Kaya Medan Tempoe Doeloe,  
Mansion Tjong A Fie
- 78** **HOBI**  
ISKAN QOLBA LUBIS  
Baca Buku dan Wisata Sejarah Dunia
- 79** **POJOK PARLE**  
Diplomasi Es Doger

SCAN QR  
UNTUK BERITA TERKINI  
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR\_RI



@DPR\_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d

# 78 Tahun DPR RI Bersama Rakyat

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Belanda bernama Volksraad. Kemudian, pada 8 Maret 1942, ketika Belanda mengakhiri masa penjajahan dan digantikan Jepang, keberadaan Volksraad tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan.





Sejarah DPR RI sendiri dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) beranggotakan 137 orang, oleh Presiden

pertama RI Sukarno pada 29 Agustus 1945 atau 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini pulalah yang kemudian diperingati sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI.

Kehadiran KNIP yang kemudian menjelma menjadi DPR RI memiliki fungsi sangat mulia sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi dan keinginan rakyat yang sangat beragam. Aspirasi itulah yang diperjuangkan di Gedung DPR RI untuk menjadi kebijakan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tugas dan fungsi itu terus berkembang, apalagi di masa sekarang dimana dinamika nasional dan global sangat tinggi yang mengharuskan DPR RI bekerja lebih responsif, adaptif, dan terbuka dengan berbagai perubahan yang terjadi.

## DPR Terus Perbaiki Kinerja

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya di acara Rapat Paripurna HUT DPR RI ke-78 tahun menyadari bahwa DPR belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Meski demikian, Ia memastikan DPR akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Tetapi DPR berharap agar masyarakat di daerah mengetahui bahwa DPR senantiasa terus mengupayakan penyerapan

aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya," ucap Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023) lalu.

Hal tersebut menjadi sebuah langkah transparansi dan akuntabilitas yang positif. Kelegawaan Puan mengakui kekurangan dan tantangan yang dihadapi DPR adalah langkah pertama menuju perbaikan. Itu sebagai bukti dari komitmen Puan sebagai pucuk tertinggi DPR agar lembaga yang dipimpinnya terus membangun kepercayaan publik. Itu mencerminkan rasa tanggung jawab seorang pemimpin.

Dalam pidatonya, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyinggung soal kritikan yang kerap diterima anggota dewan saat menjalankan tugasnya. Ia meminta anggota DPR memperbaiki kinerjanya, termasuk memperhatikan sejumlah hal yang menjadi kritikan masyarakat.

Seperti kritikan untuk meningkatkan kehadiran anggota DPR pada rapat, meningkatkan atensi dari hasil rapat bersama pemerintah, meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada rakyat, dan meningkatkan partisipasi publik dalam menyusun undang-undang. Anggota DPR juga diminta meningkatkan disiplin menjaga kehormatan sesuai kedudukan DPR RI.

"Jangan mentang-mentang DPR RI, kita tampil berlebihan tanpa mempedulikan rasa kepatutan. Kita dikritik agar dapat menyampaikan pendapat secara argumentatif bukan sekadar marah-marah. Setelah marah-marah meninggalkan ruang rapat tanpa menunggu penjelasan dari mitra kerja," tambahnya.

Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan soal kritikan kepada anggota DPR terkait kegiatan di

**Jangan mentang-mentang DPR RI, kita tampil berlebihan tanpa mempedulikan rasa kepatutan**

Puan Maharani  
Ketua DPR RI

luar ruangan sidang. Dalam setiap kegiatan di luar ruangan sidang, menurutnya, anggota DPR harus memperhatikan rasa kepatutan. Bahkan, Puan juga sempat menyebut bahwa DPR RI menerima sebanyak 4.603 aspirasi dan aduan rakyat melalui surat fisik dan 255 surat melalui website DPR. Banyaknya aduan yang masuk itu dinilai menjadi tanda bahwa DPR di bawah pimpinan Puan telah mengakomodir aspirasi masyarakat.

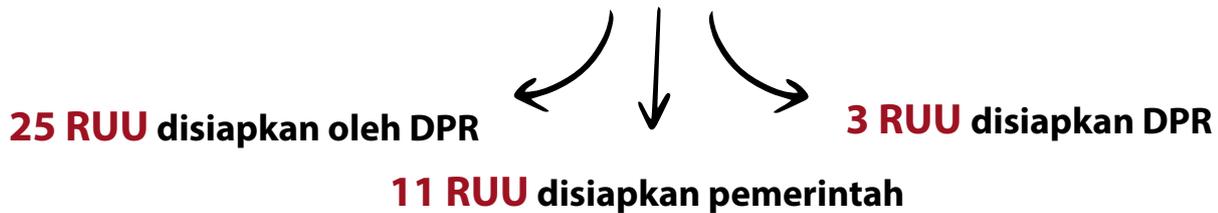
Dalam konteks demokrasi, DPR membuka saluran komunikasi dengan rakyat dan memperhatikan masukan serta keluhan yang datang dari berbagai lapisan masyarakat. DPR terus mengembangkan potensi lain dalam menyerap aspirasi publik di tengah perkembangan pesat era teknologi.

Ketua DPR RI perempuan pertama itu memastikan, DPR terus memperbaiki diri untuk dapat menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat rakyat. Ditegaskan Puan, DPR RI memiliki tekad dan komitmen untuk menjadi lembaga yang kredibel dan berintegritas.

"Komitmen ini merupakan komitmen kita semua, anggota DPR RI, untuk menjalankan kewajiban tugas dengan sungguh-sungguh, serta mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya. **we/mh**

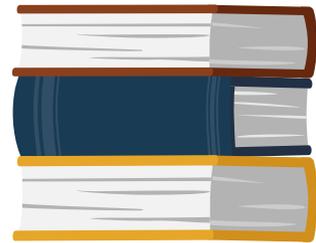
# Prolegnas

## 39 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023:



### Perkembangannya:

- 13 RUU telah disahkan menjadi UU
- 10 diantaranya merupakan RUU kumulatif terbuka
- 16 RUU dalam tahap Pembicaraan I
- 5 diantaranya merupakan RUU Kumulatif Terbuka
- 6 RUU yang akan memasuki pembicaraan Tingkat I
- 29 RUU selesai diharmonisasi (28 merupakan RUU Kumulatif Terbuka)
- 3 RUU dalam proses Harmonisasi (1 merupakan RUU kumulatif terbuka)
- 17 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan Pemerintah



Memperhatikan capaian tersebut dan mengingat kebutuhan hukum dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Baleg bersama dengan Menteri Hukum dan HAM serta PPUU DPD RI dalam evaluasi Prolegnas Tahun 2023 menyepakati untuk:

**Menarik 9 RUU dari Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 karena sudah masuk dalam Omnibus Law UU Kesehatan dan Omnibus Law UU Pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK).**

### Sebanyak 9 RUU yang ditarik, diantaranya:

- RUU tentang Wabah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- RUU tentang Penjaminan Polis
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- dan RUU tentang Pelaporan Keuangan.

# RUU Prioritas Tahun 2023

**Selanjutnya, Rapat Kerja Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM serta PPUU DPD RI juga menyepakati untuk :**

- Menambah 4 RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (usulan Pemerintah
- RUU tentang Penilai (usulan pemerintah)
- RUU tentang Pengelola Ruang Udara Nasional (usulan Pemerintah)
- dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg).

**Kemudian memasukkan:**

**3 RUU dan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 yaitu:**

- RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (usulan pemerintah)
- RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional (usulan Pemerintah)
- dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg)
- Serta Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024 menjadi 253 yang sebelumnya 259 RUU.

**Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional Tahun 2023 tersebut, maka dapat disampaikan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 menjadi:**

- 42 RUU (26 RUU diusulkan DPR
- 13 RUU diusulkan oleh Pemerintah
- dan 3 RUU diusulkan DPD RI)
- serta Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024 menjadi 253 yang sebelumnya 259 RUU.



# Menjaga Stabilitas Anggaran Pasca Covid-19

Wabah virus Covid-19 telah resmi diumumkan usai. Tentu ini berpengaruh pada wajah politik anggaran. Momentum HUT ke-78 DPR RI, Parlementaria mengajukan refleksi atas politik anggaran sepanjang satu tahun terakhir. Dimulai ketika, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah perlu mewaspadaai kesiapan fiskal tahun 2023.



Tahun 2023 APBN harus kembali defisit pembiayaan di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Terlebih, Indonesia

tak bisa lagi leluasa membuka pembiayaan utang seperti tiga tahun terakhir untuk melebarkan ruang fiskal. Said mengingatkan, pemerintah harus disiplin mengelola target. Selain itu, cepat melakukan mitigasi atas berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Berkaca dari kemampuan nasional, negara ini cepat melakukan *recovery* pada tahun 2021.

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 ini, 5,2-5,5 persen, inflasi sekitar 4 persen, kurs (Rp/USD) 14.400-14.700, dan suku bunga SUN 10 tahun 7,3-9 persen.

"Lalu target indikator kesejahteraan, yakni tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, pendapatan negara berkisar Rp2.296,64-2.507,8 triliun. Kemudian belanja negara berkisar Rp2.829,8-3.116,88 triliun, defisit berkisar 2,85 persen PDB, dan pembiayaan SBN Netto Rp600,8-902,2 triliun, investasi neto Rp65,6-205,0 triliun, serta rasio



FOTO: RUMI/NR  
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.

utang terhadap PDB 40,58-42,35 persen PDB," ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Meski demikian, dalam RAPBN 2023 dan Nota Keuangan 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Said menilai ada keoptimisan yang realistis di dalamnya. Artinya, Presiden optimis dengan segala target yang ditetapkan. Namun, tetap penuh kehati-hatian dalam menghadapi tahun yang masih penuh dengan

ketidakpastian.

Ia juga mengungkapkan, keseluruhan landasan pikir, arah kebijakan, atribusi dan distribusi anggaran yang dituangkan pemerintah pusat ke Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagai cerminan kesepakatan KEM PPKF antara Banggar DPR dengan pemerintah.

Lebih lanjut, Banggar menyampaikan setidaknya ada dua isu strategis yang dijadikan agenda pokok pembahasan APBN 2023. Pertama, yaitu melanjutkan berbagai agenda strategis nasional

jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) menuju SDM unggul dan reformasi birokrasi serta revitalisasi industri. Kedua, yakni respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun 2023.

"Maka, desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis antara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu," ujar legislator Dapil Jawa Timur XI ini.

Said menekankan dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara, maka Indonesia memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian ke depan. Terkait hal itu, Said mengingatkan agar optimalisasi PNBPN melalui berbagai program hilirisasi terus ditingkatkan pemerintah dan pemanfaatan



FOTO: RUMI/NR  
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023

barang milik negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.

"Pemerintah juga harus melakukan berbagai reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal, karena masih tingginya harga minyak dan gas dunia, memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan ekonomi menghadapi potensi kenaikan

inflasi. Lalu melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti IKN, pengembangan food estate dan reforma agraria."

Pemerintah, sambung Said, harus disiplin mengelola defisit APBN 2023 di kisaran 2,61-2,85 persen PDB dengan menjaga tingkat utang tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB. Bicara soal utang, per 31 April 2023 posisi utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp7.848,8 triliun.

Pada pembicaraan pendahuluan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024, Banggar meminta pemerintah mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Dengan jumlah tersebut, lanjut Said, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kita mencapai 38,15 persen. Selain itu, porsi bunga utang terhadap PDB juga mengalami peningkatan pada kisaran 2,0 persen. Pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 akan mencapai Rp441,4 triliun atau 2,10 persen dari PDB dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,25 persen. we/mh



FOTO: RUMI/NR  
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, saat diwawancarai awak media.

# Mengoptimalkan Semua Fungsi DPR RI

Pada Hut ke-78 tahun Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) pada 29 Agustus 2023, ada refleksi yang ingin kembali disegarkan. DPR RI terus mengoptimalkan semua fungsinya. Ada tiga fungsi yang selalu dioptimalkan pencapaiannya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bahkan, fungsi diplomasi juga dioptimalkan perannya.



FOTO: KRESNO/NR

Ketua DPR RI Puan Maharani saat membacakan Pidato Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/8/2023).



Fungsi terakhir ini, adalah memperkuat politik luar negeri Indonesia lewat diplomasi parlemen. "Serangkaian kegiatan

diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan

nasional di tingkat regional dan global," ujar Puan saat membacakan Pidato Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI, 29 Agustus lalu.

Diketahui, DPR RI pada 9-11 Agustus 2023 lalu menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang dihadiri oleh 9 ketua parlemen di ASEAN selain Indonesia, serta perwakilan 18 negara observer dan 9 perwakilan tamu dari 9 organisasi internasional.

Sidang Umum AIPA ke-44

berhasil menghasilkan 30 resolusi yang telah disetujui oleh parlemen negara ASEAN. Resolusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjawab kebutuhan masyarakat di Asia Tenggara. Serta memperkuat kerja sama dan memantapkan stabilitas politik dengan semangat solidaritas dan kesatuan ASEAN.

## Fungsi Pengawasan

DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan undang-undang (UU) yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

Fungsi pengawasan DPR RI tersebut dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar Pendapat, rapat dengar pendapat umum, panitia kerja, panitia khusus pengawasan, tim pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Dari 50 panitia kerja yang telah dibentuk, 21 diantaranya, telah dinyatakan selesai.

DPR RI juga menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, fisik, maupun online melalui website DPR RI. Sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 4.603 surat fisik dan 255 surat melalui website. Aspirasi tersebut telah

diteruskan kepada alat kelengkapan dewan terkait.

Adapun lima bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu hukum, HAM dan keamanan, pertanahan dan reformasi agraria, perdagangan, perindustrian, investasi, BUMN, ekonomi, kehutanan, lingkungan hidup, dan ESDM.

## Fungsi Anggaran

Sementara itu, melalui fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 dan pembahasan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Perekonomian Indonesia Tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Oleh sebab itu APBN sebagai instrumen negara telah bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional.

"Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ini, DPR RI bersama pemerintah sedang melaksanakan



FOTO: TIM/INR

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan buku laporan kinerja DPR RI selama tahun sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/8/2023).

pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024. DPR RI akan terus mencermati dan memastikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," ujar Puan.

## Fungsi Legislasi

Pada fungsi legislasi, DPR berhasil

mengesahkan sejumlah UU, baik inisiatif DPR RI, pemerintah, dan inisiatif DPD RI. Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui 42 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Keputusan itu didapat setelah mendengar penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas Tahun 2023, Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 menjadi 42 RUU (26 RUU diusulkan DPR, 13 RUU diusulkan pemerintah, dan 3 RUU diusulkan DPD RI), serta Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024 menjadi 253 yang sebelumnya 259 RUU. "Nah kira-kira itulah laporan dari kinerja DPR satu tahun ini. Tentu dengan menjaga keseimbangan kualitas dan kuantitas. Jadi, ada satu sisi dituntut harus banyak, tapi di sisi lain kita dituntut juga harus berkualitas. Tinggal bagaimana dengan sisa waktu yang ada ini, kami terutama dari komisi AKD terkait maupun Baleg dapat menuntaskan RUU yang telah ditetapkan tadi," tandas Lodewijk F Paulus, Wakil ketua DPR RI. — pun/mh



FOTO: KRESNO/INR

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat menghadiri Rapat Paripurna Khusus HUT ke-78 DPR RI.

# HUT DPR RI

## Jadi Ajang Otokritik Parlemen



FOTO: JAKA/NR

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

Menyambut HUT DPR RI ke-78 tahun banyak komentar dari internal DPR sendiri. Salah satu dari Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Pada HUT kali ini, ia mengingatkan pentingnya otokritik terhadap parlemen dalam menjalankan fungsinya.



Katanya, parlemen memiliki peran vital dalam mengawal demokrasi. "Parlemen ini adalah bagian terpenting

dalam representasi kedaulatan rakyat dan juga fungsi kontrol terhadap eksekutif," ucapnya.

Terlebih, lanjut dia, kontestasi

Pemilu 2024 akan digelar dalam waktu kurang dari satu tahun lagi. Kualitas untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, termasuk juga di legislatif, itu akan ditentukan pada tanggal 14 Februari 2024. Meski parlemen memiliki peran vital dalam mengawal demokrasi, Fadli menilai peran lembaga non parlemen tetap diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi.

Dia menambahkan bahwa

penyelenggaraan demokrasi tidaklah mudah, sehingga diperlukan komitmen segenap elemen bangsa dalam merawatnya, mengingat kecenderungan absolutisme akan selalu mengintai. Adapun, salah satu kunci paling penting dalam menahan absolutisme ialah dengan pembatasan masa jabatan presiden.

Senada dengan itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengucapkan selamat ulang tahun pada DPR RI dan mengajak seluruh lapisan masyarakat menjaga demokrasi. "Selamat Dirgahayu ke-78 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mari kita jaga terus demokrasi agar tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur," tuturnya kepada tim *Parlementaria* saat ditemui.

### Semangat Aspirasi dan Kolaborasi

Anggota DPR RI Agung Widyantoro berharap, DPR RI semakin menjadi parlemen modern dan maksimal



FOTO: JAKA/NR



FOTO: MENTARI/NR

Anggota DPR RI Agung Widyantoro.

dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. "DPR RI hari ini merayakan hari jadinya yang ke-78. Saya berharap semoga DPR RI semakin menjadi parlemen modern dan bisa mewujudkan rumah rakyat yang mampu mengartikulasikan banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat," jelas Agung saat ditemui sebelum rapat paripurna HUT DPR. DPR RI telah mendapatkan ribuan

aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan kepada alat kelengkapan dewan (AKD). Sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR telah menerima 4.603 aduan rakyat melalui surat fisik dan 255 surat melalui website. Untuk itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini juga berharap DPR bisa meningkatkan tugas dan fungsinya demi kepentingan rakyat Indonesia.

"Saya berharap mudah-mudahan di hari ulang tahun ke-78 ini, DPR RI bisa lebih meningkatkan perannya, baik dari sisi tugas pokok fungsinya, dalam konteks pengawasan pemerintahan, kemudian penyusunan regulasi, dan juga konteks politik anggaran. Dirgahayu DPR RI," serunya.

Ucapan ulang tahun DPR RI juga turut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya. Dirinya mengajak bersama-sama merestorasi DPR sebagai rumah rakyat Indonesia parlemen modern yang mengalirkan transparansi akuntabilitas dan spirit kolaborasi.

"Mari bersama-sama kita restorasi DPR sebagai rumah rakyat Indonesia, parlemen modern yang mengalirkan transparansi akuntabilitas dan spirit kolaborasi DPR berpihak rakyat berdaulat," ungkap Willy. Senada dengannya, Ibnu Multazam berharap DPR RI semakin dicintai rakyat dan bisa mengabdikan untuk kepentingan rakyat. "Dan selanjutnya negara Indonesia akan menjadi negara yang maju makmur dan sukses," ujar Ibnu yang juga Wakil Ketua Baleg DPR itu.

hal/mh

“

Selamat Dirgahayu ke-78 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mari kita jaga terus demokrasi agar tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur

Achmad Hafisz Tohir,  
Wakil Ketua BKSAP DPR R



FOTO: DEP/NR

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya.

# Sambut HUT DPR Melalui Perbaikan RUU ITE

Anggota DPR RI RI Muhammad Farhan menilai, tema HUT kali ini merupakan optimisme DPR dalam mewujudkan Indonesia maju. Farhan menilai sistem pemerintahan demokrasi menjadi yang paling tepat diterapkan saat ini. Pasalnya, demokrasi ini mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Demokrasi juga membebaskan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat.



FOTO: RUMAH/NR

Anggota Komisi I DPR RI RI Muhammad Farhan.



Untuk mendukung demokrasi di Indonesia, Farhan mengatakan saat ini pihaknya tengah melanjutkan

pembahasan soal kriminalisasi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terlebih menurutnya, Undang-Undang ITE

menjadi undang-undang yang 'galak' terhadap pengguna sosial media.

"(Aturan) kriminalisasi ini sebenarnya sudah ada di KUHP, jadi kita sedang menelisik kembali pasal-pasal, terutama pasal 27 dan 28 di UU ITE yang ada hubungannya dengan pemidanaan di KUHP, khususnya hukum pidana UU ITE di pasal 45. Jadi, tiga pasal ini aja butuh waktu setahun untuk merevisinya, karena banyak kepentingan di dalamnya," katanya.

Terkait kendala, Farhan mengungkapkan, saat ini DPR RI sedang membahas soal aturan kebebasan berpendapat di dunia digital. Salah satunya dengan memastikan pendapat yang diberikan sudah sesuai aturan yang berlaku.

## Momentum Indonesia Berdaulat Energi

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menilai, HUT Kemerdekaan RI dan DPR RI ke-78 harusnya



FOTO: OJI/NIR

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

menjadi momentum Indonesia untuk semakin berdaulat, termasuk dalam mengelola sumber daya energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dijelaskannya, saat ini ketahanan energi Indonesia sangat lemah, khususnya dalam hal ketersediaan, keterjangkauan harga, dan aksesibilitas masyarakat. Komoditas minyak misalnya, lebih dari separuh masih diimpor. Indonesia telah menjadi negara net importir minyak sejak tahun 2016.

Visi *lifting* minyak tahun 2030, tambahannya sebesar 1 juta barel per hari (BPH), masih menjadi mimpi. Faktanya, target *lifting* minyak secara tahunan terus turun dan capaian realisasinya juga tidak sampai seratus persen. Sementara deman minyak di Indonesia terus meningkat. Akibatnya, impor minyak setiap tahun semakin bertambah.

Terkait gas alam, lanjutnya, produksinya cukup, bahkan mampu ekspor sebanyak 30 persen dari produksi nasional. Namun, terkait

dengan gas LPG, Indonesia sangat tergantung pada produk impor. Dari tahun ke tahun deman terhadap gas LPG semakin meningkat, akibatnya impor gas LPG juga terus bertambah. Impor gas LPG menyumbang defisit transaksi berjalan sektor migas yang cukup signifikan.

Sementara soal energi listrik, Mulyanto menilai secara umum produksi listrik dalam negeri memang cukup, bahkan surplus untuk Jawa dan Sumatera. Sehingga, muncul wacana untuk mengeksport listrik dari sumber EBT ke Singapura.

Dari aspek keterjangkauan harga atau daya beli masyarakat, ketahanan energi masih lemah. Terbukti dari produk energi yang utama digunakan masyarakat adalah komoditas subsidi, baik BBM, gas LPG, ataupun listrik.

"Tanpa subsidi dari negara, maka harga energi masih tidak terjangkau oleh masyarakat. Akibatnya, ketika harga energi dunia melonjak, seperti saat perang Rusia-Ukraina yang lalu, maka beban subsidi negara semakin berat," pungkasnya. — hal/mh

“

(Aturan) kriminalisasi ini sebenarnya sudah ada di KUHP, jadi kita sedang menelisik kembali pasal-pasal, terutama pasal 27 dan 28 di UU ITE yang ada hubungannya dengan pemidanaan di KUHP, khususnya hukum pidana UU ITE di pasal 45.

Muhammad Farhan.  
Anggota DPR RI

# Kesiapan DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju



Oleh:  
**Bob Randilawe**  
Mantan Aktivist Pro-Demokrasi/  
Pemerhati Ekologi dan Politik

Tanggal 29 Agustus diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR RI). Cikal bakal DPR RI adalah sebuah lembaga kenegaraan yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP dibentuk sebagai hasil perundingan dan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 22 Agustus 1945. PPKI merupakan kelanjutan dari BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk tanggal 29 Mei 1945, yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat.

Kini, lembaga legislatif kita telah berusia 78 tahun. Sudah banyak lika-liku dilewati, pahit-getir maupun yang manis sepanjang perjalanannya. Salah satu capaian penting adalah

Tanggal 29 Agustus diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR RI). Cikal bakal DPR RI adalah sebuah lembaga kenegaraan yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP dibentuk sebagai hasil perundingan dan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 22 Agustus 1945. PPKI merupakan kelanjutan dari BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk tanggal 29 Mei 1945, yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat.

disahkannya 70 produk legislasi dalam bentuk Undang-Undang (UU) untuk periode 2019-2023 (Sekjen DPR RI, Dr. Indra Iskandar, 25 Agustus 2023). Ke-70 UU tersebut mencakup politik hingga ekonomi.

Di bidang ekonomi yang termasuk cukup strategis adalah disahkannya UU No.2/2020 tentang PERPPU No.1/2020 soal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemic covid-19. Selain itu, juga disahkan UU No.4/2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK); serta UU No.6/ tentang penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Untuk UU Cipta Kerja ini telah menimbulkan berbagai polemik dan aksi-aksi protes dari berbagai elemen perburuhan, karena dinilai kurang "berpihak" pada kepentingan buruh atau pekerja.

Di bidang politik, DPR telah mengesahkan tiga UU yang dapat dianggap strategis. Pertama UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus

Provinsi Papua; lalu UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN); dan Ketiga, 4 paket UU tentang pembentukan daerah otonomi baru



(provinsi) di Papua. Capaian UU di bidang politik ini relatif landai dari sisi resistensi masyarakat. Tak seperti UU Cipta Kerja yang hingga tulisan ini dibuat, masih saja ada kelompok buruh yang "memprotesnya".

Diharapkan dengan disahkannya berbagai paket UU politik tersebut, maka proses demokrasi konstitusional dapat berjalan efektif. Demokrasi konstitusional harus dijiwai oleh spirit kedaulatan rakyat dan tercermin dengan utuh dan konkrit melalui substansi UU yang disahkan tersebut.

### **Fungsi Supporting System Demokrasi Menuju Indonesia Maju**

Harus diakui, pada HUT ke-78 tahun ini, tata kelola kesekjenan DPR RI sebagai supporting system lembaga perwakilan rakyat sudah terhitung sangat berkembang dibanding periode sebelumnya. Bahkan, untuk kelembagaan parlemen tingkat regional ASEAN,

terhitung paling inovatif.

Betapa tidak, untuk hal sederhana saja, kini sangat sulit ditemukan sampah atau puntung rokok di koridor Gedung DPR, tak ada lagi "tamu tak diundang" yang berseliweran di koridor-koridor gedung DPR, sebagaimana dulu sering ditemui. Di pintu registrasi, setiap tamu (baca: rakyat yang datang mengadu, berdemonstrasi dan menyalurkan aspirasi) harus jelas tujuannya serta tercatat identitasnya.

Hal itu dimungkinkan salah satunya karena SOP (standar operating procedure) penerimaan tamu yang selektif bahkan cenderung "ketat". Tujuannya agar memberikan kenyamanan bagi para anggota parlemen atau wakil rakyat dalam menjalankan fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, perlu diperhatikan pula, hal tersebut jangan sampai mereduksi spirit kedaulatan rakyat dan mengurangi marwah gedung DPR Senayan sebagai "rumah aspirasi rakyat".

*Tagline* HUT DPR ke-78 tahun ini sebagaimana terpampang di sudut-sudut gedung DPR Senayan adalah "Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju". Sepintas, kalimat tersebut terkesan klise dan biasa saja. Padahal, secara leksikal kalimat tersebut mengandung makna gramatikal yang mendasar. Indonesia Maju dapat diartikan sebagai sebuah tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan yang telah mencapai tingkatan peradaban yang tinggi dan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Pada tatanan Indonesia maju tersebut, dapat dibayangkan tiada lagi kemiskinan ekstrem di perkotaan dan perdesaan, tiada lagi *stunting* dan gizi buruk bayi, terhapusnya kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, berjalannya pranata sosial dan demokrasi yang berkeadilan. Dan, pada saat bersamaan dalam

masyarakat terdapat tingkat kebahagiaan (*indeks of happiness*) yang tinggi.

Konsolidasi demokrasi akan mencegah timbulnya oligarki politik dan ekonomi yang buruk. Dengan konsolidasi demokrasi, maka kekuasaan otoriter dan parpol yang koruptif akan tersisihkan. Fungsi kontrol (*check and balances*) antarlembaga tinggi negara otomatis akan berjalan efektif bila konsolidasi demokrasi sudah terbangun dalam sistem politik kita.

Penegakan hukum juga harus berbasis pada prinsip supremasi kedaulatan rakyat. Karena supremasi hukum saja bisa terjerembab kepada "supremasi penegak hukum", dimana penegak hukum bisa berlaku semaunya. Karena itu, yang harus dibangun adalah supremasi kedaulatan rakyat dimana hukum beserta penegak hukumnya menjadi instrumen dan alat kelengkapannya.

Nah, gambaran tersebut di atas bukanlah utopi. Melainkan sebuah agenda politik kolektif yang diperjuangkan bersama-sama. Sebagaimana pembukaan UUD 45 telah menegaskan tentang sebuah kehendak kebudayaan bangsa Indonesia yang bercita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Bisa dipastikan bahwa agenda kolektif menuju masyarakat adil makmur yang memelihara prinsip-prinsip kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatannya, membutuhkan suatu lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif dan demokratis. Dan, mustahil sebuah lembaga perwakilan rakyat dapat berjalan efektif tanpa dukungan dan pengawalan sebuah supporting system yang solid dan terkelola. Inovasi, pengembangan SDM, serta komitmen dan loyalitas kepada kedaulatan rakyat diharapkan dapat mengoptimalkan berjalannya misi pengawalan tujuan-tujuan demokrasi menuju Indonesia Maju.



# Menghukum Oknum Paspampres

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Metro Jaya menangkap tiga orang tersangka, yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat (AD) dalam kasus penculikan dan penganiayaan terhadap seorang warga asal Aceh bernama Imam Masykur (25) hingga tewas.

**K**etiga prajurit TNI itu ialah Praka RM (anggota Paspampres RI), Praka HS (anggota Direktorat Topografi TNI AD), dan Praka J (anggota Kodam Iskandar Muda). Mereka bersama seorang warga sipil berinisial ZSS, yang merupakan kakak ipar Praka RM, melakukan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap Imam Masykur. Korban, yang merupakan perantau asal Aceh, diculik oleh para pelaku pada tanggal 12 Agustus 2023 di toko kosmetik daerah Rempoa, Tangerang Selatan.

Kepada korban dan warga sekitar, para pelaku sempat mengaku sebagai polisi. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan Rp50 juta. Menanggapi kasus ini, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengingatkan agar oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang diduga sebagai pelaku harus mendapat hukuman setimpal.

"Kami sudah mendengar komitmen dari Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI maupun Angkatan Darat, kemudian dari panglima TNI, untuk menindak para pelaku ini, ada tiga orang, untuk betul-betul mendapat tindakan setimpal, hukuman setimpal sesuai peraturan yang berlaku," kata Lodewijk akhir Agustus 2023 lalu.



FOTO: RUNI/FAISAL/NR

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Lodewijk menyayangkan peristiwa yang melibatkan tiga terduga pelaku dari kalangan militer tersebut hingga menyebabkan nyawa seorang warga sipil melayang. "Tentunya, tindakan-tindakan itu sangat kami sesalkan. Saya mantan prajurit, tentu apa pun alasannya, itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum," ujar politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Dia pun berharap kejadian tersebut menjadi peringatan bagi prajurit lainnya untuk taat pada undang-undang, serta senantiasa

melindungi rakyat. "Kami harapkan ini juga menjadi peringatan bagi prajurit-prajurit yang lain (agar) tetap betul-betul sebagai prajurit Sapta Marga, yang taat terhadap undang-undang yang berlaku, karena prajurit itu kan punya jati diri. Kami dikatakan kami lahir dari rakyat, maka janganlah menyakiti hati rakyat," jelas Lodewijk.

Di lain pihak Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai kasus tersebut sebagai kejahatan serius yang harus diusut secara sungguh-sungguh dan tuntas. Ia pun meminta

“

Tentunya, tindakan-tindakan itu sangat kami sesalkan. Saya mantan prajurit, tentu apa pun alasannya, itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum

Lodewijk F. Paulus,  
Wakil Ketua DPR RI



FOTO: JAKA/NR

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

agar ketiga terduga pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal, guna menegakkan keadilan. Didik pun mendorong agar peradilannya dilakukan dengan transparan, adil, dan akuntabel.

"Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung secara independen dan profesional. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi agar keadilan

bagi korban dan keluarganya dapat diwujudkan," tandas Didik awal September 2023 lalu. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini pun melayangkan kecaman atas perilaku oknum Anggota Paspampres Praka RM dan dua anggota TNI, yang diduga menganiaya seorang pemuda asal Aceh hingga tewas.

Ia pun mendorong agar proses peradilan atas kasus tersebut

dilakukan melalui peradilan umum. "Saya bisa mengerti dan memahami serta setuju dengan beberapa pendapat publik bahwa kejahatan ini tergolong dalam kejahatan pidana umum. Untuk itu saya juga bisa memahami dan ikut mendorong agar proses peradilannya dapat dilakukan melalui peradilan umum," ungkap Didik.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya, berencana menyurati Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar segera mengusut kasus ini secara transparan. "Kami mengecam aksi keji yang dilakukan terhadap Imam Masykur, warga Bireuen. Aksi kriminal ini harus diusut tuntas," ucap Riefky baru-baru ini.

Langkah itu, kata Riefky, diambilnya sebagai pimpinan Komisi I DPR, yang bermitra langsung dengan TNI. Dia akan mendesak kasus ini diusut hingga tuntas. "Dalam kapasitas saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I, yang bermitra dengan TNI, saya akan menyurati panglima untuk memastikan kasus ini diusut tuntas dan transparan ke publik," sambungnya. **ssb/mh**



FOTO: MENTARI/NR

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya.

# Menilik Amunisi Mewujudkan SDM Unggul 2024

Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana arah kebijakan APBN tahun 2024. Sejauh apa kemudian pemerintah menyiapkan anggaran sebagai amunisi agar strategi yang dicanangkan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

**D**alam Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Nota Keuangannya, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Termaktub dalam pidato tersebut, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi salah satu strategi jangka menengah yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Pemerintah tentunya telah menyiapkan sejumlah anggaran sebagai amunisi mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing. Sebanyak 20% APBN atau Rp660,8 triliun digelontorkan untuk memenuhi anggaran



FOTO: TIM/INR

Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal.

pendidikan. Sedangkan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN. Tak lupa disiapkan juga anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan mencapai Rp493,5 triliun.

"Kalau (anggaran) pendidikan 20% itu konstitusi, ini amanat. Cuma, dalam praktiknya di fungsi pendidikan ini belum terasa oleh rakyat luas, karena belum tertatanya anggaran pendidikan ini secara fungsi yang

kita harapkan, yaitu hak-hak dasar rakyat mendapatkan pendidikan," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui *Parlementaria* di Senayan, Jakarta, Selasa (22/8) silam.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap, nantinya akan ada kebijakan wajib belajar hingga bangku perguruan tinggi. Namun, ia tak menampik untuk memenuhi kewajiban belajar 9 tahun pun masih

banyak yang terseok. Padahal, kebijakan yang sudah dicanangkan adalah wajib belajar 12 tahun hingga jenjang menengah atas.

Ia lantas membandingkan besaran anggaran pendidikan dengan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Pagu Anggaran Kemendikbud pada RAPBN 2024 sebesar Rp9,7 triliun, hanya 14% dari total belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendidikan 2024. Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2024 sendiri berasal dari alokasi belanja pemerintah pusat Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, Kemendikbudristek seharusnya memperoleh pagu anggaran 2024 yang proporsional dari anggaran pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Baginya, ini harus menjadi perhatian bersama agar pemerataan pendidikan di Indonesia terwujud.

"Walaupun kita tahu (anggaran pendidikan lebih banyak turun



FOTO: DEP/NR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.

langsung ke daerah), Rp600-an triliun dari (anggaran pendidikan) itu, seharusnya at least 50 persennya itu dikelola oleh Kemendikbud (sekitar) Rp200 triliun," ungkapnya dalam rapat dengan Mendikbudristek di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023) silam.

Polemik anggaran kesehatan pun tak kalah menarik. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani, disahkannya UU No.17/2023 tentang Kesehatan tak lagi "memaksa" pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi mandatory spending untuk anggaran kesehatan sebesar 5% seperti pada tahun-tahun lalu.

Anggaran kesehatan dalam RAPBN 2024 sebesar Rp186,4 triliun diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Selain itu, untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.

Bahkan, anggaran itu juga diarahkan untuk mengefektifkan program JKN dan mempercepat penurunan prevalensi *stunting* agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi. **uc/mh**



FOTO: MUNICH/NR

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani.

# Revisi UU Desa Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa resmi menjadi RUU inisiatif DPR setelah ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR, Juli lalu. UU Desa butuh revisi untuk mendukung desa menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis. Muaranya adalah menyejahterakan masyarakat desa.



FOTO: DEP/IR

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas.

**K**etua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi undang-undang yang sudah berlaku hampir 10 tahun itu tentu untuk mendukung perkembangan desa. "Sehingga, dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ini juga untuk menjawab kebutuhan hukum dalam masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang diputuskan Mahkamah Konstitusi RI," jelasnya.

Dalam revisi ini, beberapa poin krusial mengemuka, antara lain pada Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan

lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan.

Penyisipan satu pasal di antara Pasal 34 dan Pasal 35, yakni Pasal 34A tentang jumlah calon kepala desa. Lalu perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun untuk dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sebelumnya masa jabatan kepala desa enam tahun paling banyak tiga kali masa jabatan.

Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Kemudian, Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah.

Penyisipan 1 pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal 79 ayat (2) huruf a mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu sembilan tahun.

Selain itu, terdapat beberapa

revisi pada Pasal 3; Kedudukan dan Wilayah Desa (Pasal 4 dan 4a); Perangkat Desa (Pasal 48-50); Kewajiban Masyarakat Desa (Pasal 67); dan Ketentuan Peralihan Masa Jabatan dan Periodisasi Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa (Pasal 118).

## Peningkatan Alokasi Transfer Daerah

Soal peningkatan alokasi transfer daerah. Supratman mengatakan, kesepakatan peningkatan alokasi tersebut menjadi tumpuan bagi parlemen untuk mewujudkan desa di Indonesia secepatnya bisa bertransformasi menjadi lokomotif pertumbuhan negara.

"Kita mau memberi afirmasi ini kepada desa sebagai lokomotif pertumbuhan ke depan. Kalau kita berharap ke sana, mencegah migrasi desa ke kota maka alokasi dana desa itu harus besar supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Ini menjadi wujud nyata keberpihakan kita kepada desa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, kenaikan dana desa diharapkan bisa mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Adapun



FOTO: DOK/NR

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi.

dana transfer daerah terdiri atas enam komponen, yakni dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Soal kemudian apakah 20 persen ini disetujui pemerintah, itu nanti dalam pembahasan. Setidaknya kami mengajukan usulan sebagaimana aspirasi yang kami dapatkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Tentu pembahasannya nanti akan

diformulasikan bersama pemerintah," urai anggota F-PPP DPR ini.

Oleh karena itu, Baidowi menekankan perhitungan porsi penambahan anggaran diperhitungkan secara adil dan proporsional. Dirinya berharap pembahasan tersebut dibahas dengan seksama agar tidak menimbulkan kecemburuan sekaligus konflik sosial dalam penerapannya nanti.

Selaras, Anggota Baleg DPR RI Desy Ratnasari, mewakili Fraksi PAN juga mendukung penambahan Alokasi Dana Desa per tahun secara terukur sesuai dengan kemampuan APBN. Terlepas dari adanya perbedaan perspektif mengenai porsi penambahan anggaran, ia berharap aspirasi dan masukan yang disampaikan memberikan manfaat baik untuk masyarakat desa.

"Mengutip dari Pak Sturman, semua kebenaran itu pasti punya argumentasi, alasan, perspektif. Pasti masing-masing akan mempertahankan kebenarannya. Nah, tentu kebenaran kita untuk bersama hadir di sini adalah kebenaran yang memberikan kemanfaatan," terang Desi.

 **bia/mh**

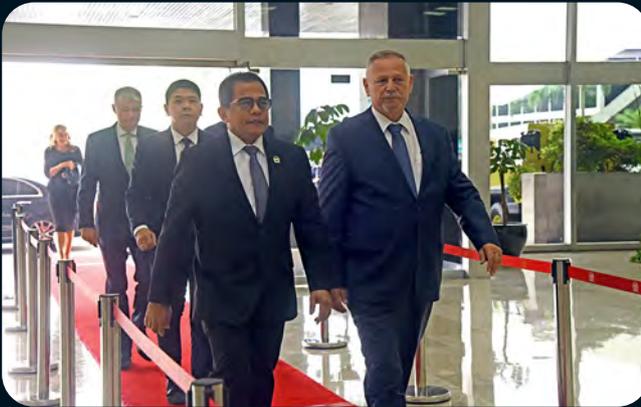


FOTO: DOK/NR

Anggota Baleg DPR RI Desy Ratnasari.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu dengan sejumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di sela-sela meresmikan Sanggar Inklusi Kinasih Wijaya di Sanggar Inklusi Kinasih Wijaya, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (3/9/2023).  
FOTO: CAHYO/MAN



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Kroasia (Sabor) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).  
FOTO: RUNI/MAN





Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Delegasi Pemimpin Mahasiswa Malaysia, di ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023). FOTO : YOGA/MAN



Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel saat membuka acara bazar dan pasar murah bertajuk "Bersama PIA Berbagi Kebahagiaan Dalam Rangka Hut DPR RI KE-78 Tahun," di Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023). FOTO: AZKA, DEVI/MAN





Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat foto bersama usai menerima kunjungan kehormatan Delegasi Jepang yang digelar di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Widy Chandra, Jakarta, Jumat (18/8/2023).  
FOTO: MENTARI/MAN



Foto bersama usai Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus melantik Budhy Setiawan (dua dari kiri) sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mewakili Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).  
FOTO: RUNI/MAN



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Sekretaris Jenderal DPR RI, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dan Asisten Operasi (Asops) Kapolri pada Senin (28/8/2023). FOTO: FARHAN/MAN



Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Forum Konsultasi dan Uji Publik Penguatan Standar Pelayanan Setjen DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023). FOTO: FARHAN/MAN



Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Sumariyandono saat menghadiri Forum Konsultasi dan Uji Publik Penguatan Standar Pelayanan Setjen DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023). FOTO: FARHAN/MAN



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi dalam foto bersama usai mengisi kuliah umum 'Magang di Rumah Rakyat' di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023). FOTO: FARHAN/MAN

# *Polusi Udara* Kepung Jakarta dan Sekitarnya

NASKAH: JAKA NUGRAHA • FOTO: JAKA NUGRAHA DAN DEVI IRIANDI

**K**ualitas udara di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini tampak buruk, bahkan berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada awal bulan Agustus, Jakarta pernah menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Menurut data indeks kualitas udara (AQI), Jakarta pernah berada di angka 170 atau masuk kategori tidak

sehat dengan polusi udara PM2.5. Meski sudah ada beberapa upaya penanggulangan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi polusi udara ini, namun belum terjadi perubahan berarti.

Bahkan, Kementerian Kesehatan RI juga telah mengimbau agar masyarakat memakai masker saat beraktifitas di luar. Ini untuk meminimalisasi paparan polusi udara di Jabodetabek belakangan ini.  [jk/mh](#)





**M. Nasim Khan**

# **Politisi Religius dari Situbondo**

Asembagus, begitu nama desa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Masyarakatnya sangat religius dan mayoritas berprofesi sebagai petani. Banyak pendatang mengadu nasib di Situbondo. Daerah ini dikenal sebagai penghasil tebu. Dahulu, banyak pabrik tebu berdiri dan karenanya Situbondo juga dikenal sebagai kabupaten gula. Setidaknya, ada enam pabrik tebu di Situbondo. Namun, pabrik tebu itu sudah banyak yang tutup, kecuali di Asembagus dan Kecamatan Panji yang tersisa.

**K**arena masyarakatnya yang religius, Situbondo juga dikenal sebagai bumi shalawat dan kota santri. Banyak pesantren berdiri di sini. Syahdan, di Desa Asembagus inilah hidup keluarga religius. Seorang ibu bersahaja sedang menanti persalinan anak keduanya. Tahmid tiada henti terucap ketika bayi laki-laki mungil menggemaskan lahir. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 10 Juni 1975.

Bayi itu kemudian diberi nama Muhammad Nasim Khan. Nasim hidup di tengah keluarga religius. Ia anak dari sepasangan insan bernama H.M. Nazir Khan seorang pengusaha dan Hj. Bilqis Aliyah, seorang ibu rumah tangga yang bersahaja. Setelah kelahiran Nasim, masih ada satu adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Nasim adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

Nasim dan keluarga tinggal di sebuah rumah, persis di pinggir jalan raya. Suara kendaraan yang bising berlalu lalang di depan rumahnya sudah biasa terdengar. Ketika kecil, Nasim sangat suka bermain

bersama sahabat-sahabat kecilnya di desa. Bila musim layangan tiba, ia bermain layangan. Begitu juga bila musim kelereng, Nasim kecil suka sekali bermain kelereng. Bermain gambaran, engklek, dan bom bambu dengan karbit juga sangat disukai.

Dahulu banyak sekali pilihan permainan tradisional bagi anak-anak. Tidak seperti di era sekarang, pilihan permainan ada di genggam tangan berupa handphone. Mengawali pendidikan formalnya, Nasim kecil bersekolah di SDN 1 Asembagus, tahun 1981. Sekolah ini dikenal juga sebagai sekolah Cina, karena mayoritas etnis Tionghoa yang bersekolah di sini. SDN 1 Asembagus juga dikenal sebagai sekolah favorit. Setiap hari, Nasim berjalan kaki ke sekolah bersama para sahabatnya.

Kenakalan masa kecil Nasim juga kerap muncul. Ia suka membuat onar dan keributan di sekolah.

Ia, misalnya, suka mengganggu guru di dalam kelas. Hukumannya, Nasim kerap menerima amarah dan dipukul gurunya. Begitu sepenggal cerita masa kecil. Bila ditanya, apa cita-cita yang terbersit saat kecil.



Nasim kecil saat usia TK.

ia ingin menjadi pengusaha seperti ayahnya. Tahun 1987, ia tamat SD dan melanjutkan ke SMPN 1 Asembagus. Jarak ke SMP sekitar 2 km dari rumah. Nasim suka naik sepeda ontel untuk sampai ke sekolah.

Tahun 1990 tamat SMP dan melanjutkan ke SMAN 2 Situbondo. Karena sekolahnya di pusat kota, Nasim pun naik bus, bahkan kost dekat sekolahnya. Ketika di SMA, ia duduk di jurusan A1 (fisika). Walau tak rajin, tapi ia tergolong anak yang cerdas di sekolah.

### Panggung Politik

Setamat SMA, 1993, pemuda Nasim melanjutkan studinya ke Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Ia mengambil jurusan teknik mesin. "Jurusan tersebut merupakan pilihan saya, karena saya berpikir teknologi industri mesin di Indonesia akan semakin maju dan lebih baik," aku Nasim.

Selama menjadi mahasiswa ITN, ia aktif menjadi aktivis kampus.



Muhammad Nasim Khan bersama ibunya.

## PROFIL



FOTO: IST/ANR

Muhammad Nasim Khan (tengah) bersama kerabatnya

Tercatat, ia aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Malang, Ikatan Mahasiswa Situbondo, bahkan aktif pula pada Ikatan Mahasiswa Madura. Aktif di komunitas Madura, lantaran nenek Nasim berasal dari Madura. Sementara kakeknya pendatang dari Pakistan, bernama Sayyid H. Hikmat Khan.

Sang kakek adalah pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sempat membelot dari pasukan Gurka untuk membela Indonesia. Mengenang masa mahasiswa di ITN, 99 persen mahasiswanya adalah pria. Hampir tak ada perempuan di kampus ini. Salah satu dosen favoritnya adalah Pak Rajihan. Dia dosen kemahasiswaan. Nasim menilai, Pak Rajihan dosen yang paling hebat di ITN Malang.

Tahun 2000, lulus kuliah dan sempat bekerja di Telkomsel, Malang. Tak lebih dari setahun bekerja di Malang, Nasim hijrah ke Jakarta. Di ibu kota, ia sempat masuk dunia entertainment dan menjadi

model. Setelah itu, ia lebih banyak berkecimpung pada bisnis permata hingga sekarang.



FOTO: IST/ANR

Foto kenangan Muhammad Nasim Khan saat menjadi model.

Pergaulannya yang sangat luas dengan semua kalangan dan lapisan masyarakat, mengantarnya pada tawaran politik. Ia tertarik masuk panggung politik. Partai pertama yang disinggahi adalah PPP. Pada pemilu 2009, ia memberanikan diri berkontestasi politik. Namun, ketika itu belum mendapat suara yang cukup untuk duduk di Senayan.

Pada Pemilu 2014, Nasim pindah partai dan masuk PKB. Pada kontestasi politik tahun itu, ia berhasil mendulang suara signifikan dari dapil Jatim III yang meliputi Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo. 1 oktober 2014, ia resmi dilantik menjadi anggota DPR RI. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nasim menjadi wakil rakyat. Di pundaknya kini ada beban tanggung jawab mewakili masyarakat dari tiga kabupaten di Jawa Timur itu.

Bicara soal kiprahnya di panggung politik, Nasim ingat petuah sang ayah yang menyatakan, "Suatu saat, kamu akan jadi pemimpin. Maksudnya, ya mungki kiprah di DPR," ungkapnya. Mengawali kiprahnya di parlemen,



Nasim duduk di Komisi VI yang membidangi BUMN, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Pada Pemilu 2019, Nasim kembali maju dari dapil yang sama dan terpilih lagi untuk periode keduanya. Dan Nasim tetap duduk di Komisi VI hingga kini.

## Menyukai Kuliner Indonesia

Sejak menjadi wakil rakyat, kesibukannya luar biasa. Namun, Nasim tetaplah sosok yang bersahaja dan religius. Di rumah ia tetap seorang suami yang mencintai keluarganya. Di rumahnya ada Farah Diba sang istri tercinta. Bila ada waktu luang, ia kerap berwisata bersama keluarga.

Menurutnya, wisata di Tanah Air sangat luar biasa dibanding berwisata ke luar negeri. Wisata alam, seperti pegunungan dan pantai sangat disukai. Satu lagi, ia juga sangat menyukai kuliner Nusantara. Ketika ditanya apa makanan favoritnya, Nasim menjawab, pecel, rawon, soto. Itu beberapa kuliner Indonesia yang disukainya. "Favorit saya pokoknya



FOTO: IST/ANR

Muhammad Nasim Khan. Selama dua periode berada di Komisi VI DPR RI.

makanan-makanan lokal. Saya kesulitan kalau makan bila sedang di luar negeri. Tidak hanya soal makan, soal toilet dan cuaca juga jadi masalah bagi saya," akunya.

Berada di negeri sendiri,

menurutnya, sangat nyaman ketimbang berada di luar negeri. Indonesia adalah surga kuliner dan wisata. "Kita harapkan ke depan, wisata dan kuliner Indonesia terus maju, tapi tetap tidak menghilangkan nilai kebangsaan Indonesia," katanya.

Sementara membicarakan soal musik kesukaan, Nasim mengaku semua genre musik disukainya. Yang penting baginya, musik itu enak didengar dan dinikmati. Ia tak monoton soal kesukaan yang satu ini. Dangdut, pop, rok, sampai lagu religi semua suka. Bahkan, penyanyi dalam dan luar negeri juga pernah ia dengarkan lirik-lirik lagunya.

Sebut saja Oasis, Phil Collins, Iwan Fals, Ebiet G Ade, dan lain-lain adalah sederet nama penyanyi dan grup musik yang disukai. Begitulah kesukaannya pada dunia kuliner, wisata, dan musik yang jadi sisi lain dari sosok seorang Nasim Khan. Ia tidak saja tampil ramah saat *Parlementaria* menemuinya di ruang kerja, tapi, ia juga tampak sangat religius. Begitulah cerita singkat politisi religius dari Situbondo, Jawa Timur. **tf/mh**



FOTO: IST/ANR

Muhammad Nasim Khan (paling kanan) bersama keluarga tercinta. Duduk paling depan, ayah dan ibunya.

# Membekali Generasi Muda dengan Informasi yang Baik



FOTO: BUNGA/AR

Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI Fadli Zon saat memimpin Kunspek Komisi I DPR RI ke LPP RRI Mataram.

**Generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, memiliki peranan penting untuk menentukan arah demokrasi Indonesia terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Oleh karenanya, generasi muda perlu mendapatkan informasi yang jelas.**

**K**omisi I DPR RI mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, Nusa Tenggara Barat (NTB). RRI dipandang strategis untuk

menyiarankan informasi penting, terutama dalam menyambut Pemilu 2024. Informasi pemilu tersebut penting pula didengar kaum muda sebagai pendidikan politik.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon saat memimpin delegasi Komisi I ke LPP RRI Mataram, NTB, Kamis, (24/08/2023) lalu. "Milenial dan gen Z memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi negara kita. Oleh karena itu, program-program RRI haruslah mampu berbicara dengan bahasa yang relevan bagi mereka, serta menyampaikan pesan-pesan yang memotivasi partisipasi aktif dalam pemilihan umum," ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif program siaran yang sudah dilakukan dengan melibatkan beberapa kelompok generasi muda. Fadli menambahkan bahwa betapa

pentingnya memiliki peta profil pendengar yang jelas agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan menjangkau target lebih luas dan sesuai.

"Kami minta ke depan LPP RRI memiliki peta profil pendengar. Sehingga, mampu merancang konten siaran yang berkontribusi untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif, dan meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas dan kualitas, khususnya generasi milenial dan Gen Z," tutup Fadli.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Stasiun RRI Mataram Yanto Prawironegoro berkomitmen mengembangkan program-program khusus yang akan menghadirkan wawasan politik dan informasi seputar pemilihan umum dengan pendekatan yang menarik dan interaktif bagi milenial dan gen Z.

"Kami dari LPP RRI Mataram

sendiri sangat terbuka atas masukan-masukan yang diberikan oleh Komisi I DPR terkait sosialisasi pemilu kepada generasi-generasi muda. Kami pun telah membuat beberapa program dengan *tagline* #kanalpemilihcerdas sebagai inisiatif program siaran Pemilu 2024,” ungkap Kepala Stasiun LPP RRI Mataram tersebut.

Sementara di Jambi, Komisi I mengunjungi LPP TVRI. Di Jambi, masih membicarakan isu yang sama, yaitu bagaimana mengemas program acara yang menarik untuk Pemilu 2024. Anggota Komisi I DPR RI Mohammad Idham Samawi menyatakan komitmennya memperjuangkan anggaran LPP TVRI pada rapat-rapat Komisi I maupun Badan Anggaran. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat kunjungan kerja spesifik Komisi I ke LPP TVRI Jambi, Kamis (24/8/2023) lalu.

“Terkait program sebagian besar sudah sangat baik, sekali hanya tadi masih ada titik lemah berkaitan dengan infrastruktur. Nah, ini yang akan kita perjuangkan lewat Komisi

I nanti dengan mitra kerja, baik di kementerian terkait atau ketika rapat kerja dengan Direksi TVRI,” ungkapnya, seraya memberikan apresiasi bagi program-program LPP TVRI Jambi terkait Pemilu 2024.

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini menjelaskan bahwa Komisi I memang tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang merancang anggaran. Meski begitu, perjuangan dapat dilakukan melalui anggota Komisi I yang juga mengemban tugas di Badan Anggaran DPR RI.

“Komisi I tidak memiliki hubungan dengan Menteri Keuangan padahal kalau bicara APBN sekalipun itu kenceng banget (dibahas) di komisi tapi muara akhirnya ada di Menteri Keuangan. Nah nanti kepada teman-teman di Komisi I yang duduk di badan anggaran akan diminta untuk memperjuangkannya dan kebetulan saya sendiri ada di Badan Anggaran,” lanjutnya

Menutup pernyataannya, legislator

Dapil D.I Yogyakarta ini menilai masukan terkait anggaran yang diterima pada rapat kunjungan kerja spesifik Komisi I dengan LPP TVRI Jambi yang didampingi oleh Direktur Teknik LPP TVRI ini masih berada pada koridor prioritas yang perlu dijadikan pertimbangan.

Masih di Jambi, Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, meminta TVRI Jambi untuk lebih gencar dalam menyebarkan dan menyosialisasikan informasi-informasi terkait pemilu khususnya kepada anak-anak muda. “Ada sedikit PR untuk TVRI Jambi bahwa partisipasi pemilih untuk DPR RI ini cuma 60%. Berarti kita harus menyosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya pemilu untuk legislatif,” ujar legislator Dapil Jambi itu.

Politisi Partai NasDem itu lantas menceritakan pengalamannya mengunjungi sebuah acara. Di sana ia mendapati bahwa kebanyakan peserta yang berasal dari generasi muda tidak mengetahui tanggal penyelenggaraan pemilu mendatang.

— **bif,uc/mh**



FOTO: UCHA/IR

Anggota Komisi I DPR RI Mohammad Idham Samawi saat memimpin rapat kunjungan kerja spesifik Komisi I ke LPP TVRI Jambi.

# Melihat Perkembangan IKN, dan Merivisi UU IKN



FOTO: LIBED/NIR

Foto bersama Anggota Komisi II DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra saat mengikuti kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di IKN.

**Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja spesifiknya kali ini, melihat langsung perkembangan pembangunan mutakhir Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahun depan rencananya IKN sudah ditempati untuk menjalankan pemerintahan, termasuk migrasi aparat sipil negaranya. Bahkan, peringatan HUT Kemerdekaan 2024 juga akan digelar di IKN.**

**B**ersamaan dengan itu, Komisi II DPR juga sedang merivisi UU No.3/2022 tentang IKN. Anggota Komisi II DPR RI A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra mengungkapkan, tahap pertama pembangunan IKN berdampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat setempat.

"Aspirasi yang disampaikan oleh

masyarakat setempat sangat positif. Semenjak ada pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai terlihat, dari semula rumah kayu sekarang sudah banyak renovasi-renovasi rumah penduduk dan geliat ekonomi masyarakat sangat terlihat," papar Bagus kepada *Parlementaria* usai berkunjung ke IKN, Rabu (23/8/2023) lalu.

Pembangunan IKN memberikan

dampak positif bagi perekonomian kawasan. Sebelumnya, masyarakat kesulitan mendapat akses pekerjaan. Namun, kini penghasilan masyarakat setempat kian meningkat, terutama sebagai pekerja di IKN. Kunjungan kerja Komisi II ke IKN dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan disambut oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Komisi II menilai pembangunan IKN tahap pertama dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana. Presiden RI Joko Widodo pun kelak dapat menggelar upacara kenegaraan 17 Agustus 2024 di IKN. Doli sendiri mengatakan bahwa Komisi II DPR sebelum melakukan revisi UU IKN, harus berkunjung dulu ke kawasan IKN untuk melihat dari dekat perkembangan yang ada.

Yang sudah terbangun di IKN adalah menara pandang sumbu kebangsaan barat, hunian pekerja konstruksi, istana negara, perumahan menteri, dan bendungan Sepaku Semoi. Doli mengaku terkejut dengan progres pembangunan yang ada. "Kita juga sebetulnya terkesima, karena saya terakhir ke sini kurang lebih tahun lalu belum ada apa-apa sama sekali. Jadi, kita terkesima juga melihat kurang dari setahun progresnya begitu cepat sampai hampir 40 persen pembangunan. Jadi, sudah kelihatan bentuknyalah. Kalau sampai akhir tahun 70 persen, kita yakin tanggal 17 Agustus 2024 bisa dilakukan upacara bendera di IKN," imbuhnya.

Sementara di Yogyakarta, Komisi II DPR melihat dari dekat kesiapan tahapan pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengapresiasi kesiapan tahapan

penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ia menilai sejauh ini, Kabupaten Sleman sudah cukup baik dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilakukan pada 24 Februari 2024 mendatang.

Kesiapan tersebut berkaitan dengan pendataan penduduk sebagai pemilih, utamanya pendataan pemilih pemula di Kabupaten Sleman yang menurutnya sudah dilakukan dengan baik. "Berkaitan dengan data pemilih, maupun data pemilih pemula, semuanya sudah terekam dengan baik," ujar Syamsurizal usai kunjungan kerja Komisi II ke DIY, Kamis (24/8/2023) lalu.

Lebih lanjut, tahapan pendaftaran calon legislatif (caleg) yang telah dijalankan dan diumumkan pada 19 Agustus lalu, juga dinilai berjalan cukup baik. "Kita pelajari juga persiapan lainnya berkenaan dengan daftar caleg sementara yang sudah diumumkan, tadi sudah dilaporkan hampir dikatakan tidak ada persoalan, hampir semuanya sudah memenuhi persyaratan, dari data calon anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota serta untuk DPR RI," jelasnya.

Terakhir, dari sisi pengawasan, politisi Fraksi Partai Persatuan



FOTO: BIANCA/ANR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke DIY.

Pembangunan ini mengatakan, Bawaslu Kabupaten Sleman telah melaksanakan kontrol yang baik dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. "Penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Sleman menyampaikan pada kita bahwas kontrol-kontrol yang mereka lakukan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, Alhamdulillah semuanya sudah berjalan baik," tutupnya.

Begitu juga di Solo, Jawa Tengah, delegasi Komisi II DPR

memantau kesiapan pemilu pada Kamis (24/8/2023) lalu. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia yang meimimpin delegasi meminta otoritas penyelenggara Pemilu 2024 di Kota Solo tetap solid supaya pergelaran pesta demokrasi Indonesia tetap kondusif.

"Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi oleh seluruh stakeholder untuk memastikan persiapan dan kesiapan pemilu ini dapat dilaksanakan dengan baik," ucap Doli. Lebih lanjut, mewakili Komisi II DPR, dirinya menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menjaga komitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. Sebab itu, ia ingin memastikan semua regulasi hukum terkait penyelenggaraan pemilu diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu memahami bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak menyebabkan tahapan persiapan dan pelaksanaan menjadi rumit dan kompleks. Hal tersebut, ungkapnya, akan mengakibatkan beban penyelenggara pemilu sekaligus pemerintah juga menjadi tinggi. — uf, bia, ts/mh



FOTO: SAUM/ANR

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI di Kota Solo.

# Menyorot Sengketa Lahan



FOTO: SAJUM/NR

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang.

**Komisi III DPR RI menyorot soal sengketa lahan pada kunker reses kali ini. Sengketa lahan terjadi di Sumatera Selatan dan Komisi III menginginkan penanganan kasusnya berdasarkan pendekatan keadilan (*restorative justice*).**

**A**nggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berharap Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak berpihak dalam menangani kasus sengketa lahan. Kasus sengketa lahan di Sumsel cukup tinggi. "Jangan sampai Polda Sumsel memihak. Saya berharap pendekatan *restorative justice*,

apalagi yang berhubungan dengan masyarakat adat setempat. Kalau hanya pakai pendekatan pidana, masalah akan jadi semakin larut," tutur Taufik, di Palembang, Kamis (10/8/2023).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai NasDem ini mendorong Polda Sumsel tidak lelah berinovasi mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi kasus tersebut. "Saya juga

berharap pihak Polda Sumsel bekerja sama dan berkoordinasi untuk tetap berinovasi menegakan hukum dengan pendekatan yang lebih baik," pungkasnya.

Kepala Polda Sumsel Rachmad Wibowo berkomitmen, berupaya melakukan pendekatan yang lebih baik untuk menangani kasus sengketa lahan di Sumsel. Ia memaparkan bahwa Polda Sumsel sepanjang tahun 2021-2023 telah menyelesaikan 259 perkara sengketa pertanahan.

Terkait dengan penanganan sengketa lahan, Forkopimda kabupaten/kota dan provinsi, Polda Sumsel bersama BPN Sumsel membuat tim terpadu. Secara rinci,



FOTO: SAJUM/NR

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang.

tim tersebut menangani kasus sebanyak 43 kasus.

Sementara Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi kinerja Polda Sumsel pada pertengahan tahun 2023 ini. Sikap ini disampaikannya usai mendengarkan pemaparan Kepala Polda Sumsel mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di

“

**Kita semua bicara pakai fakta, pakai data, pakai angka, sehingga semuanya terlihat objektif. Semuanya tidak ada saling menegasikan atau saling menyudutkan.**

Arteria Dahlan.  
Anggota Komisi III DPR RI

Provinsi Sumsel.

"Kita semua bicara pakai fakta, pakai data, pakai angka, sehingga semuanya terlihat objektif. Semuanya tidak ada saling menegasikan atau saling menyudutkan," ungkap Arteria kepada *Parlementaria* usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (10/8/2023) lalu.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, menilai layanan publik Polda Sumsel sudah selaras dengan nilai presisi, yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Di mana, keselarasan ini terlihat dari kemampuan dan kolaborasi segenap Polda Sumsel saat menangani kasus *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, dan sengketa tanah.

Tidak berhenti pada kasus-kasus tersebut, Arteria juga mendukung semangat Polda memberantas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan narkoba. "Kita juga apresiasi (Polda) Sumsel berada pada peringkat nomor 2 untuk

menjadi pelopor penegakan hukum pencegahan TPPO dan kami dukung semangat pencegahan peredaran narkoba," imbuhnya.

Diketahui, Satgas TPPO Sumsel telah mengungkapkan 23 perkara TPPO tahun 2023. Di mana, jumlah korban yang diselamatkan sebanyak 35 orang dan berhasil menangkap tersangka sejumlah 24 orang. Selain itu, mengenai penegakan hukum bidang tindak pidana narkoba hingga awal Agustus 2023, Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap 6.348 tersangka serta 318 bandar narkoba.

Menambahkan, Kepala Polda Sumsel Rachmad Wibowo menyampaikan bahwa saat ini Polda Sumatera Selatan menghadapi kompleksitas sekaligus tantangan di tengah dinamika sosial dan kemajuan teknologi saat ini. Walaupun begitu, segenap Polda Sumsel selalu mengingatkan setiap personel untuk kerap berinovasi, menerapkan nilai presisi, dan memberikan layanan publik terbaik baik secara kuantitas maupun kualitas. **ts/mh**

# Pandan Wangi Harus Dilindungi



FOTO: TIARA/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari saat mengikuti pertemuan Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Cianjur.

**Varietas padi Pandan Wangi dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendapat perhatian serius Komisi IV DPR RI. Padi varietas ini jadi unggulan komoditas Cianjur. Varietas ini sempat dipalsukan di pasaran, bahkan ada kekhawatiran diklaim pihak asing.**

**A**nggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong adanya perlindungan varietas unggul padi Pandan Wangi, khas Cianjur. Ia berharap varietas unggulan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Cianjur.

"Kabupaten Cianjur punya potensi lokal yang berbeda dari daerah lain. Jadi, memang harus ada

perlindungan bagi varietas unggul padi Pandan Wangi. Kalau tidak ada perlindungan seperti Perda yang mengatur, khawatir akan diambil oleh pihak asing. Bisa saja mereka (pihak asing) mengambil plasma nutfah padi kita, kemudian dibudidayakan di nengaranya dengan teknologi bio teknologi. Ini harus kita jaga dan lindungi," ungkap Endang.

Kepada *Parlementaria* di Cianjur, Senin (17/8/2023) silam, Endang menyerukan, RUU Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) perlu juga memberi perlindungan atas varietas unggulan lokal. Kebetulan RUU sedang dirumuskan di Komisi IV DPR. "Indonesia adalah negara yang punya plasma nutfah dan sumber genetik nomor dua di dunia, ini harus kita lindungi. Kalau tidak, nanti dicolong pihak asing dan tidak ada yang menuntut, karena tidak punya dasar UU-nya," jelas Endang.

Endang juga menekankan standarisasi yang jelas, karena penting untuk memastikan keberlangsungan varietas Padi Pandan Wangi di Cianjur. Ia juga menilai perlu ada perlindungan tata ruang yang baik, agar padi dapat ditanam dengan optimal serta keterlibatan berbagai pihak dalam



FOTO: RIA/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty saat mengikuti kunjungan kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Denpasar.

menyelamatkan varietas padi Pandan Wangi.

"Terlebih anak muda juga harus dilibatkan, karena sekarang zamannya media sosial yang sudah jauh lebih efektif dan digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, dengan adanya peranan anak muda sebagai generasi penerus

bangsa terlebih yang aktif di media sosial, saya harap bisa membantu melindungi varietas unggul yang kita miliki," ujarnya.

Sementara di Bali, Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) yang secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh pemerintah Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Ia menilai kebijakan yang memberlakukan zona penangkapan ikan dan basis kuota penangkapan cenderung akan menguntungkan pemilik modal besar atau korporasi perikanan.

"Kebijakan penangkapan terukur yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada nelayan tradisional," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Denpasar, Bali, Selasa (18/7/2023) silam. Legislatur dapi Maluku itu juga menambahkan, dalam kebijakan PIT perlu penegakan aturan untuk memastikan, zona penangkapan ikan terukur ditaati oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu ia menegaskan bahwa pengawasan mesti diikuti dengan penerapan peraturan tersebut. Legislatur F-PKS DPR itu juga menyoroti PP No.85/2021 mengenai penetapan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai 10 persen untuk kapal berukuran di atas 60 gross tonnage. "Aturan tarif PNBP pasca produksi saat ini sangat memberatkan nelayan," katanya.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menggaungkan asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pondasi utamanya adalah asas pemerataan, asas peran serta masyarakat, dan asas keadilan. Untuk itu, ia berharap infrastruktur dermaga dibangun untuk penangkapan kebijakan ikan teurkur.

"Paparan menteri KKP ada sembilan dermaga yang harus dibangun sebagai supporting system kebijakan ikan terukur. Saya harap kebijakan ini dapat memajukan dan mensejahtera daerah penghasil," tegasnya. — tra, rnm/mh

“

**Kebijakan penangkapan terukur yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada nelayan tradisional.**

Saadiah Uluputty  
Anggota Komisi IV DPR RI.

# Menata Perkampungan Kumuh di Kalimantan Timur



FOTO: WILGA/NR

Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat Komisi V DPR RI mengunjungi Kampung Selambai, Bontang, Kalimantan Timur.

**Perkampungan kumuh di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu ditata ulang. Butuh anggaran untuk penataan sekitar Rp30 miliar. Perkampungan kumuh tersebut tepatnya berada di Kampung Selambai, Bontang, Kaltim.**

**A**nggota Komisi V DPR RI Irwan, menyerukan penataan ulang tersebut saat ikut dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Kaltim. "Di beberapa rapat, saya meminta Kementerian PUPR melanjutkan penataan kawasan kumuh di Selambai. Kalau tidak mangkrak, output-nya gimana supaya bisa menurunkan

tingkat kekumuhannya. Artinya, bebas *stunting* dan sanitasi tuntas," jelasnya saat mengunjungi Kampung Selambai, Bontang, Kaltim, Selasa (8/8/2023) silam.

Legislator Dapil Kaltim ini, mengungkapkan Kampung Selambai pernah mendapatkan penanganan kawasan kumuh pada tahun 2019-2020 dengan alokasi anggaran Rp18 miliar. Penataan di kawasan

Selambai akan terus berlanjut untuk menurunkan tingkat kekumuhannya. Kawasan tersebut kelak bisa disulap menjadi area publik baru di Kota Bontang.

"Selambai bisa jadi pusat publik baru bagi wisata dan kuliner. Kalau itu terjadi, bisa membantu PAD Bontang dan tentunya menyelesaikan masalah utamanya, yakni kekumuhan dan kemiskinan," tandas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Sementara Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Rozali Indra mengatakan, akan ada gelontoran dana sebesar Rp30 miliar untuk membeton jembatan di Kampung Selambai yang menjadi skala prioritas pembangunan



FOTO: JIWA/NR

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maizat saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Riau.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Betonisasi, sebutnya, dibutuhkan untuk mobilitas masyarakat dan konektivitas. Selain itu, diharapkan mampu mendorong pariwisata di atas laut Kampung Selambai.

Saat ini, Indra menjelaskan, tahapan yang sedang dilaksanakan yakni review Detail Engineering Design (DED). Ia pun memastikan bahwa tahap lelang juga akan dilaksanakan tahun ini. "Skema yang digunakan ialah tahun jamak. Tahap lelang akan dilakukan tahun ini juga. Kalau tahapan ini sudah selesai langsung kami kerjakan," tutupnya.

Masih di Kaltim, Irwan juga meninjau banjir rob di Kelurahan Bontang Kuala. Masalah ini juga jadi prioritas untuk segera ditangani. "Kenapa saya prioritaskan? karena selain tempat wisata, Bontang Kuala ini juga jadi tempat sejarah lahirnya Kota Bontang. Terus kami kawal sampai terealisasi," ungkap Irwan kepada *Parlementaria*.

Irwan juga menjelaskan, untuk

penanganan banjir rob di Bontang Kuala perlu kajian yang mendalam, mengingat banjir rob tidak bisa dilakukan hanya dengan peningkatan jalan dan pembuatan pagar keliling untuk membendung air masuk. Sebab banjir siklus air pasang laut ini terus meningkat karena kondisi alam.

"Bukan hanya jalan nasionalnya dan tanggulnya, akan tetapi kita harus melihat limpasan dari air laut, jangan sampai kita tutup tanggul jalan tetapi dari (celah) lain bisa masuk," terang politisi Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Irwan mengatakan, ia bersama Komisi V akan memastikan bahwa penanganan banjir rob di Bontang Kuala ini bisa segera direalisasikan minimal paling lambat tahun 2024 sudah bisa dilakukan penanganan. "Ini kebetulan, kan, mau penetapan APBN di Oktober nanti, jadi kita berjuang bersama-sama," sambungnya.

Sementara di Riau, delegasi Komisi V DPR meninjau infrastruktur. Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maizat berharap kepada

pemerintah agar memberikan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur di Riau. Dia pun komit akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau.

Di hadapan para kepala daerah kabupaten dan kota serta OPD di Kantor Gubernur Riau dia mengungkapkan permasalahan infrastruktur. "Kami komit untuk selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Riau untuk semaksimal mungkin, agar anggaran pusat turun ke Riau," papar Syahrul di Riau Jumat (14/7/2023) silam.

Menurutnya, untuk melaksanakan pembangunan di Riau, tentu tak cukup hanya bertumpu pada kemampuan finansial daerah saja. Namun, harus ada alokasi APBN. Saat Rapat Paripurna DPR, Syahrul menegaskan, agar jangan sampai pemerintah tak adil kepada Riau yang telah memberikan devisa yang begitu banyak untuk negara ini.

we, ssb/mh

# Mengapresiasi Pembangunan Tol Bocimi



FOTO: MUNICHEN/NIR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sukabumi.

**Komisi VI DPR RI mengapresiasi pembangunan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang berdampak positif pada peningkatan perekonomian di tiga wilayah tersebut. Komisi VI sempat meninjau langsung infrastruktur yang satu ini dan dinilai cukup bagus didesain.**

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal yang memimpin pertemuan Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan PT. Waskita Karya di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023), mengatakan, "Hari ini kita sudah sampai ke pintu tol Parung Kuda. Ternyata, tolnya memang cukup

bagus. Dan yang menjadi bahagia hari ini, setelah pemaparan oleh mitra kerja terkait, target LHR (lalu lintas harian rata-rata) yang diharapkan sudah hampir mendekati pencapaian target LHR. Artinya, tol ini akan beroperasi dengan baik," katanya.

Pada tahun 2023, pembangunan tol Bocimi berhasil mencapai seksi 2. Komisi VI berharap agar seksi 3 dapat selesai pada akhir 2024 dan

membuka jalan bagi beroperasinya tol ini pada awal 2025 hingga merambah hingga ke Sukabumi Barat. Ada penyertaan modal negara (PMN) yang digelontorkan untuk tol Bocimi. Diproyeksikan, tol ini beroperasi pada awal 2025.

Dalam konteks pelayanan masyarakat, tol Bocimi dapat mengurangi waktu perjalanan yang dulu memakan waktu 5 jam menjadi hanya 2 setengah jam dari Jakarta ke Sukabumi. Peningkatan konektivitas ini diharapkan membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat.

"Tapi, alhamdulillah sampai di titik ini (pintu tol Parung Kuda) saja, nanti wilayah Pelabuhan Ratu akan bisa berkembang dengan pesat, kira-kira dari titik sini (pintu tol Parung

Kuda) untuk menuju ke Pelabuhan Ratu tinggal 1 jam 20 menit," ucap politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Dengan pembangunan tol Bocimi seksi 3 yang mungkin akan mencari pendanaan komersial dan perpanjangan hingga seksi 4, serta rencana untuk menghubungkannya dengan tol Cipularang, Hekal optimis pembangunan tol Bocimi membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Sementara di Jawa Timur, Komisi VI DPR menyorot soal distribusi LPG 3 kg. Anggota Komisi VI DPR Khilmi, menanggapi kebijakan pemerintah terkait pembelian LPG 3 kg yang harus menggunakan KTP. Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 itu membuat pembelian LPG bersubsidi tersebut hanya untuk masyarakat yang sudah terdata.

Khilmi meminta pemerintah tidak gampang mengubah kebijakan. Apalagi, terkait dengan subsidi yang diberikan ke masyarakat, katanya di Jawa Timur, Senin (28/8/2023) lalu. Kebijakan pemerintah mewajibkan penggunaan KTP untuk membeli LPG 3 kg merupakan upaya transformasi subsidi yang diawali dengan pendataan dan pencocokan data pengguna agar lebih tepat sasaran



FOTO: BALGUIS/NR

Anggota Komisi VI DPR Khilmi saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik di Jawa Timur.

dan dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu, dan tidak terulang seperti pupuk subsidi.

Selain itu, pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu ada kontrol yang kuat hingga ke tingkat agen guna memastikan konsumsi LPG 3 kg tidak melebihi kebutuhan. Hal ini untuk menghindari terjadi gejolak yang terjadi pada gas LPG.

Di Sumatera Utara (Sumut),

delegasi Komisi VI DPR menyorot soal kinerja Pelindo. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi Pelindo yang jauh lebih efektif pasca merger perusahaan. Hal ini disampaikan Rudi saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR ke Sumut, Senin (28/8/2023) lalu.

"Kita melihat tadi hasil paparan Dirut tentang nilai atau value setelah Pelindo merger. Hasilnya, kita melihat semua lebih efektif, mereka membagi region-region bagian 1, 2, 3 dan 4, kinerja keuangannya lebih maksimal, lebih terarah dan terukur, juga koordinasi antara region dengan dirut dan direksinya lebih tepat sasaran" ujar politisi Fraksi Nasdem tersebut.

Meskipun demikian, legislator Dapil Sumut III ini menyayangkan keberhasilan Pelindo ini kurang diketahui publik. Hal itu karena kurang sosialisasi atas capaian kinerja Pelindo kepada masyarakat. "Sebaiknya Pelindo lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa saja yang dikerjakan Pelindo dan apa saja keberhasilan Pelindo. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui kinerja Pelindo" tutupnya.

mun, gys, pdt/mh



FOTO: PRIMA/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sumatera Utara.

# Meninjau Pertambangan Emas dan Perak

Area pertambangan di Sumatera Utara ditinjau langsung oleh Komisi VII DPR RI. Kali ini yang ditinjau adalah PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai perusahaan pemegang izin usaha eksplorasi dan pengolahan emas di Martabe, Sumut.



FOTO: ANNE/NR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Wakil Presiden Direktur Agincourt Resources Ruli Tanio beserta jajaran yang digelar secara virtual di Kota Medan.

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mendorong

PT Agincourt Resources (PTAR) meningkatkan kontribusinya kepada negara dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bambang dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Wakil Presiden Direktur Agincourt Resources Ruli Tanio beserta jajaran yang digelar secara virtual di Kota Medan, Sumut, Jumat (1/9/2023) lampau.

"Dalam penjelasan tadi disampaikan PT Agincourt sudah bisa menyerap tenaga kerja sekitar 3.000 orang dan kami ingin mendorong Agincourt meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga membuka ruang kerja semakin besar," ujar Bambang.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, tambang emas Martabe merupakan salah satu lokasi yang memiliki kandungan emas tinggi. Diketahui pada tahun

2022, produksi emas dari tambang Martabe mencapai 280.000 ons. Meski kapasitas produksi perlu ditingkatkan, Bambang mengingatkan agar perusahaan tetap menerapkan praktik tambang berkelanjutan (*sustainable mining*).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII juga mempertanyakan skema perpanjangan Kontrak Karya (KK) PTAR yang akan berakhir pada 2027 mendatang. Terkait masalah perpanjangan KK, Bambang mengatakan, jika mengacu pada UU No.3/2020, khususnya Pasal 169B, ayat (2) disebutkan, pengajuan permohonan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dilakukan paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum KK berakhir.

"Yang artinya proses

perpanjangan KK menjadi IUPK kelanjutan operasi kontrak sudah dapat dilakukan oleh PTAR. Namun, untuk memperoleh perpanjangan menjadi IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak, PTAR berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang di dalam KK," ungkap dia.

PT Agincourt Resources merupakan perusahaan pertambangan dengan spesialisasi eksplorasi dan penambangan logam mulia seperti emas dan perak. Adapun area operasional berada di tambang emas Martabe yang meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Sebagai perusahaan pemegang KK generasi ke-6, PTAR juga telah melakukan penandatanganan amandemen KK



FOTO: AVU/NR

Ketua Komisi VII DPR RI, Donny Oekon saat memimpin kunjungan kerja Reses Komisi VII DPR ke Sumatera Utara.

sebagai amanat dari Pasal 169 UU No.4/2009 tentang Pertambangan Minerba.

Beberapa pasal dalam KK dilakukan perubahan atau penyesuaian terutama yang berkaitan dengan 6 isu strategis, yaitu luas wilayah perjanjian, kelanjutan operasi pertambangan menjadi IUPK OP, masalah penerimaan negara, kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian (hilirisasi), kewajiban divestasi dan kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

Sementara di Riau, Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan di Kantor Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Riau. Dalam pertemuan, isu peningkatan *lifting* minyak jadi pembahasan.

Hingga kini, Pertamina Hulu Rokan (PHR) setiap hari tercatat melakukan *lifting* minyak bumi sebanyak lebih dari 160 ribu barel. Angka ini meningkat sejak pertama kali dilakukan serah terima dari

Chevron ke Pertamina. Namun, masih jauh di bawah capaian pada rentang 1980-1990-an.

Pada tahun 2031 mendatang, PHR ditargetkan harus mampu melakukan *lifting* minyak bumi hingga 231 ribu barel per hari. Hal ini ditujukan untuk mendukung target 1 juta barel per hari yang dicanangkan SKK Migas. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon yang memimpin delegasi Komisi VII, mendesak, PHR berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang akan mendukung pencapaian target tersebut.

Ia menekankan, agar PHR mempertimbangkan dari sisi ekonomi seperti membandingkan investasi yang dilakukan dengan hasil yang akan didapatkan. "Dia (PHR) akan mencoba di tahun 2031 itu kurang lebih sekitar 231 ribu *barrel per day* (bpd). Kita mau coba buktikan, tapi kembali lagi harus *economic wise*. Tidak mungkin kalau kita investasinya terlalu besar tapi dengan hasil yang

cuman 231 ribu barel. Itu harus betul-betul *economic wise*," ujarnya saat ditemui *Parlementaria*, seusai rapat, di Pekanbaru, Riau, Jumat (1/9/2023) lampau.

Dony menjelaskan bahwa Blok Rokan yang kini dikelola PHR pernah mencapai produksi tertingginya pada awal era tahun 1980-an hingga mencapai 1,2 juta barel per hari. Produksi Blok Rokan terus menurun hingga berhenti produksi selama 3 tahun sebelum resmi dilakukan serah terima. Di awal operasionalnya di bawah PHR, Produksi Blok Rokan hanya berkisar 100 ribu barel per hari dan jumlahnya terus meningkat.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa dengan progres yang ditunjukkan oleh PHR, maka target 231 ribu barel per hari pada 2031 kemungkinan besar dapat terealisasi. Terlebih, saat ini menurutnya, PHR masih melakukan uji coba dalam berbagai hal termasuk dalam penggunaan teknologi.

ann, uc/mh

# Mempercepat Penghapusan Kemiskinan



FOTO: HUSEIN/ANR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyerahkan bantuan Kemensos secara simbolis usai pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor.

Presentasi penduduk miskin di Indonesia masih terus menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, karena angkanya yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Di Kota Bogor misalnya, Tahun 2020 angka kemiskinannya mencapai 75.000 (6.68%). Tahun 2021 mencapai 80.000 (7.24%). Bahkan, pada 2022, angkanya menurun lagi berkisar 79.000 (7,15) dari total penduduk Kota Bogor sekitar 1.1 juta jiwa.

**M**elihat hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, bantuan sosial (bansos) merupakan komitmen negara untuk terus dilakukan secara masif untuk percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem Indonesia Tahun 2023-2024. Salah satu upaya yang dilakukan dengan program bantuan sosial. Beberapa jenis bansos untuk rakyat dikembangkan dan diperluas mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga

Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ bantuan pangan non tunai.

"Atas dasar itu, Komisi VIII DPR ingin mengetahui lebih mendalam terkait pelaksanaan program bantuan sosial di Kota Bogor dan efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan baik melalui berbagai skema bantuan sosial maupun skema program CSR yang ada di Kota Bogor," ungkap Diah saat memimpin pertemuan dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Jumat (1/9/2023) silam.

Usai pertemuan, Komisi VIII DPR dan pemerintah kota Bogor mendistribusikan bansos dari Kementerian Sosial. Salah satunya adalah bantuan asistensi rehabilitasi yang jumlahnya mencapai

Rp176.601.952 serta bantuan aksesibilitas berupa alat bantu disabilitas untuk lima orang yang jumlahnya mencapai Rp14.223.500.

Selain di Bogor, tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII juga meninjau pelaksanaan program bantuan sosial di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan jajarannya, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad yang memimpin kunjungan meminta program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terus di-update. Sehingga, program jaminan sosial tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Melalui Kemensos, Komisi VIII DPR menyerahkan bantuan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) senilai total Rp30.252.595.534 di Sentra Abiseka Pekanbaru. "Karena tujuannya untuk meningkatkan ekonomi, jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja. Kami dari Komisi (VIII DPR) terus dorong kebijakan yang pro masyarakat. Kami berikhtiar mewujudkan masyarakat yang sejahtera," ujarnya.

Selain fokus di bidang sosial, Komisi VIII juga menyorot evaluasi



FOTO: ULEFI/NR

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad saat menyerahkan bantuan secara simbolis melalui Kemensos di Sentra Abiseka Pekanbaru, Riau.

pelaksanaan haji dan umrah, salah satunya pada pelayanan penerbangan. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, pelayanan yang diberikan untuk jemaah haji dan umroh masih belum maksimal.

"Kami ingin dari proses pelayanan ini, betul-betul jemaah haji umroh Indonesia diberikan pelayanan yang terbaik," ujar Ace usai melakukan peninjauan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (1/9) silam. Pelayanan terhadap para jemaah terutama lansia harus

diprioritaskan terutama sarana dan prasarana pendukungnya. "Misalnya, kayak kursi rodanya dan lain lainnya" ujar Ace.

Meski begitu, Ace mengaku melihat peningkatan layanan di Bandara Soetta lebih baik. Hal itu salah satunya terlihat dari hadirnya pelayanan fast track. Ia pun mengapresiasi atas hal itu dan berharap ke depan fast track dapat diperbanyak. "Sehingga lebih memudahkan bagi proses pelayanan kepada jemaah," lanjutnya.

mh,upi,hal/mh



FOTO: HIRAN/NR

Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat melakukan peninjauan di Bandara Soekarno Hatta.

# Memperhatikan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja



FOTO: PUNTHO/INR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Provinsi Riau.

**Penyelenggaraan perlindungan sosial bagi pekerja di daerah jadi perhatian Komisi IX DPR RI. Awal Septemembr lalu, Komisi IX membagi timnya untuk melakukan pengawasan ke tiga provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).**

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena yang memimpin kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau beserta pemerintah kabupaten/kota yang sudah peduli terhadap pekerja rentan seperti petani, nelayan, buruh bangunan, dan lainnya melalui intervensi APBD untuk jaminan sosial

ketenagakerjaan.

"Hal ini tentu sangat positif. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia meningkatkan jaminan sosial bagi para pekerja rentan lewat anggaran APBD," ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut di Auditorium Menara Lancang Kuning Pekanbaru, Jumat (1/9/2023) lalu.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati

juga memberikan apresiasi atas peningkatan pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

"Saya rasa ini sebuah apresiasi yang harus kita berikan atas pencapaian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus meningkatkan keikutsertaan BP Jamsostek, pasalnya kepesertaan sangat penting guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada teman-teman pekerja, baik yang formal maupun yang informal," katanya di Bangka Belitung, Jumat (1/9/2023) lalu.

Legislator PKS ini, menekankan perlu ada kontribusi serta dorongan yang kuat terhadap para pekerja di Indonesia agar dapat mengikuti BP



FOTO: RUNI/NR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jamsostek guna mencapai target capaian nasional, yakni delapan puluh persen. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama serta kerja keras bagi semua pihak, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi target capaian nasional.

Sementara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita

Runtuwene menemukan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal seperti pelaku UMKM, *driver online*, pedagang pasar, dan lain sebagainya di Yogyakarta masih sangat minim dari jumlah pekerja informal yang ada.

Untuk itu, Felly meminta pemerintah daerah memasifkan sosialisasi tentang kemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan, agar mereka mendapatkan perlindungan dengan

menjadi peserta.

"Pemerintah lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data, baru 30% dari total pekerja formal yang terdata. Minimal dua program yang mereka miliki, yaitu program kecelakaan kerja dan program kematian. Ini kecil biayanya akan tetapi kurang sosialisasinya," katanya, saat pertemuan dengan Bupati Bantul, Jumat (1/9) lalu.

Perlindungan jaminan sosial ini bukan menjadi pekerjaan pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah berupa penganggaran atau pengalokasian anggaran daerah bagi jaminan sosial pekerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pekerja rentan.

Kebijakan penganggaran premi jaminan sosial diatur dalam Permendagri RI No.84/2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Jaminan sosial yang dibangun ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah. **— pun, cas, rni/mh**



FOTO: CHASBI/NR

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat menyerahkan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan secara simbolik usai pertemuan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul.

# Menyoal Dana Bantuan untuk PTS



FOTO: WILGA/NR

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Banyuwangi.

**Pengawasan terhadap dunia pendidikan adalah langkah mewujudkan generasi emas. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan pun turut serta melakukan pengawasan serta memperjuangkan aspirasi rakyat.**

**D**i Bayuwangi, Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira berharap dana dan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah di kampus-kampus di Banyuwangi, khususnya kampus swasta, ditambah.

Pasalnya, dalam kunjungan kerja Komisi X ke Banyuwangi itu, para stakeholder pendidikan di Bayuwangi menyampaikan aspirasi mengenai

minimnya bantuan pemerintah untuk dana operasional perguruan tinggi swasta (PTS). Disampaikan Andreas, para praktisi di PTS merasa ada ketidakadilan pemerintah terhadap dana-dana bantuan yang diberikan kepada perguruan tinggi.

"Dari beberapa kampus yang ada tadi, ada Politeknik Banyuwangi, ada Universitas PGRI, dan beberapa kampus lain yang juga menyampaikan pesan khusus

berkaitan dengan soal keadilan dalam sikap dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan terhadap perguruan tinggi swasta, dalam hal pembiayaan pendidikan. Kalau dana operasional seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) itu memang belum ada untuk PTS, ini kita juga menjadi perhatian. Cuma kami juga tahu bahwa situasi penganggaran di Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga masih belum memperoleh maksimal dari dana pendidikan dari APBN," terangnya.

Sementara di Sumatera Barat, Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah membahas mengenai persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan persoalan yang berulang dan dialami sama tiap



FOTO: RUMI/NR

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

tahun.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan jika persoalan PPDB ini terus berlanjut maka akan merampas hak belajar siswa. Karena, siswa yang telah nyaman belajar sejak di jenjang SD, harus berhenti di jenjang SMP karena terbatas soal usia. "Ini kan artinya merampok belajar mereka sehingga mereka akhirnya berhenti dan menunggu di tahun berikutnya," tegas Himmatul.

Untuk itu, ia meminta Kemendikbudristek untuk segera

membuat kebijakan yang bisa mengafirmasi semua persoalan. "Diharapkan persoalan ini menjadi perhatian khusus dari Pemerintah. Jangan hanya mengandalkan hal-hal yang memang sudah ada sebelumnya tapi tidak ada perbaikan apa-apa. Kami minta dengan sangat kepada pemerintah agar segera kebijakan ini dirubah ya jangan sampai melanggar hak asasi manusia hak belajar siswa," tekan Politisi dari Dapil DKI Jakarta II ini.

Sementara di Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY), Komisi X membahas mengenai perkembangan ekonomi kreatif. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengungkap dukungannya terhadap sinergitas antardaerah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif daerah di Indonesia.

Legislator F-Golkar itu juga menambahkan peningkatan kolaborasi antardaerah sangatlah penting untuk dapat meningkatkan jumlah pemasaran dari produk produk ekonomi kreatif.

"Harus menjadi sebuah komunitas dan berkolaborasi antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan provinsi provinsi lain juga agar memiliki dampak positif bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia," sambung Legislator Dapil Jabar XI tersebut.

Nantinya seluruh saran dan masukan dari para pelaku ekonomi kreatif di Yogyakarta ini akan menjadi bahan untuk dibahas Komisi X DPR RI pada saat Rapat Kerja dengan Kemenparekraf. Sehingga, nantinya seluruh para pelaku usaha di Indonesia dapat merasakan manfaat lebih baik dari sisi produksi, penjualan serta distribusi. **— pdt, we, rni/mh**



FOTO: PRIMA/NR

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat melihat hasil kerajinan rotan dan lain-lain dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Yogyakarta.

# Meningkatkan Kembali Literasi Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diserukan terus memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan literasinya. Tidak hanya literasi, inklusi keuangan juga perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kepedulian pada masyarakat.

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyampaikan hal ini saat

memimpin kunjungan kerja Komisi XI ke Bali, Jumat (25/8/2023) lampau. Ia mendukung LPS yang terus giat mengedukasi masyarakat meningkatkan literasi keuangan. Menurutnya, edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan *awareness*, meningkatkan inklusi, dan literasi keuangan.

"Saya kira masih perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat, karena kita harus maklumi literasi keuangan di masyarakat masih sangat rendah, sehingga masyarakat masih sering dimainkan oleh pelaku industri jasa keuangan, apalagi pinjol ini masih sangat berpengaruh di masyarakat," ungkap politisi dari Fraksi PPP DPR itu.

Ia mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi



Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Bali.

masyarakat guna memahami sektor keuangan untuk menopang kehidupan yang lebih baik. Apalagi, menurut dia, minimnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab seseorang terjebak pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

Dirinya mendukung LPS meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka Kantor Perwakilan (Kanwil) di beberapa daerah. Beberapa Kanwil LPS yang ditargetkan beroperasi tahun depan, yakni Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumatera Utara, dan Kanwil Sulawesi Selatan.

"Kita berharap, LPS mulai membuka kantor perwakilan supaya kedekatan dengan industri makin dekat, sehingga pengawasan juga semakin bagus untuk dilakukan," katanya. Ia menambahkan,

keberadaan perwakilan LPS di beberapa kota baru diharapkan dapat mendukung sosialisasi dan edukasi mengenai peran dan fungsi LPS yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan asuransi.

Masih di Bali, Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong Bank Indonesia berperan strategis dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (GBBI-BBWI). Melalui GBBI-BBWI diharapkan terjadi peningkatan permintaan terhadap produk dalam negeri, peningkatan transaksi pembelian produk lokal, serta peningkatan daya beli masyarakat dan percepatan siklus ekonomi lokal.

"Kalau kita bangga dengan produk dalam negeri buatan



FOTO: TIARA/ANR

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Indonesia, spending kita untuk membeli produk dan jasa UMKM, maka impor kita akan berkurang. Ini artinya akan meningkatkan produksi dalam negeri, kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, hingga mengurangi tingkat kemiskinan," ungkap Hendrawan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke kabupaten Badung, Bali, Jumat (25/8/2023) lampau.

Hendrawan menilai sejauh ini peran BI dalam memberi dukungan terhadap Gernas BBI-BBWI ini sudah cukup baik. Ke depan, ia berharap BI dapat menjaga sinergitas, agar UMKM dan sektor pariwisata di Bali tetap optimistis semakin tumbuh dan dilirik masyarakat lokal dan mancanegara, sehingga memberikan outcome dan output yang positif bagi masyarakat Bali khususnya di kabupaten Badung.

"Memang perekonomian akan tumbuh apabila kapasitas produksi dalam negeri serta produktivitas masyarakatnya meningkat. Dan salah satu unsur yang sekarang ini berat dihadapi UMKM adalah bagaimana efektivitas penggunaan

teknologi bisa dimanfaatkan agar dapat meningkatkan kualitas produk-produk dan jasa dari UMKM. Nah, untuk itu BI dapat mendorong melalui program digitalisasinya dan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya penting juga memaksimalkan sinergitas," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono menyampaikan BI Provinsi Bali telah membina 53 UMKM, diantaranya 23 UMKM pendukung pariwisata (fashion, makanan & minuman, kopi, kriya, tanaman hias, dan digital kreatif), serta 3 desa wisata binaan yaitu Desa Wisata Tampaksiring, Desa Wisata Duda, dan Desa Wisata Sidan. Selain itu, BI Bali juga memiliki 15 mitra UMKM pendukung pariwisata yang bergerak di bidang fesyen, kriya, dan makanan minuman olahan.

"Belakangan ini kebutuhan akan produk dan wisata berkelanjutan semakin meningkat sering dengan meningkatnya *awareness* masyarakat tentang isu sustainability. Berkaitan dengan tantangan serta peluang tersebut, BI Bali mengarahkan

UMKM maupun kelompok binaan termasuk desa wisata agar bergerak mendukung sustainability. Upaya tersebut dituangkan dalam pemberian berbagai pelatihan mendukung industri berkelanjutan salah satunya pelatihan penggunaan pewarna alam untuk UMKM fashion," ujarnya.

Sementara tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan GBBI-BBWI salah satunya, yaitu tingginya permintaan produk UMKM binaan fashion seperti tenun saat ini belum diimbangi dengan kapasitas produksi yang memadai. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya SDM dalam hal ini para penenun.

"Sebagai tindak lanjut, BI Bali secara berkala aktif memberikan pelatihan dan bantuan peralatan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi. Selain itu, BI Bali turut bekerja sama dengan institusi pendidikan seperti ISI, LPK, Institut Seni dan Desain Bali, dan Pasraman untuk mengembangkan minat pelajar terhadap pelestarian wastra Bali," imbuhnya. — ann, tra/mh

# Polusi Udara DPR Wacanakan Pembentukan Pansus



FOTO: IST/ANR

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris

**Indonesia menjadi satu dari enam negara yang berkontribusi terhadap penyebaran polusi udara di dunia. Kualitas udara yang semakin memburuk membuat masyarakat Indonesia berpotensi kehilangan harapan hidup sebesar 1,4 tahun dan kerugian ekonomi mencapai Rp35,1 triliun akibat polusi udara. Menjadi ancaman serius bagi negara, DPR mewacanakan pembentukan Pansus Polusi Udara.**

**B**erdasarkan Laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan (AQLI) yang bekerja sama dengan Institut Kebijakan Energi (EPIC) Universitas Chicago

menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari enam negara yang paling berkontribusi terhadap polusi udara global.

Terhitung awal tahun 2023, kualitas udara di wilayah Jabodetabek

semakin memburuk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh [aqicn.org](http://aqicn.org), indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) bisa mencapai satuan AQIPM<sub>2.5</sub> dengan skor indeks mencapai 154 di wilayah Jabodetabek. Angka tersebut menunjukkan setiap orang yang menghirup udara tersebut berpotensi besar akan mengalami ISPA.

Tidak hanya di wilayah Jabodetabek, kualitas udara di Provinsi Kalimantan Tengah dinilai terburuk di Indonesia. Berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (3/9/2023)

terungkap bahwa indeks kualitas udara di Kalteng sebesar 253. Dari angka tersebut, setiap orang yang menghirup berpotensi terjangkit penyakit jantung, penyakit paru obstruktif, atau kanker paru.

Dampaknya kini nyata terjadi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan dari hasil data pemantauan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit menunjukkan terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jabodetabek selama enam bulan terakhir. Salah satunya, wilayah DKI Jakarta bisa mencapai 100 ribu kasus/bulan yang terkena ISPA.

Selain itu, selama dua bulan terakhir, kasus ISPA di Kota Banjarmasin terdeteksi semakin meningkat menjadi sebanyak 4.351 orang. Selain kerugian kesehatan, berdasarkan riset IQAir dan Greenpeace Asia Tenggara, kerugian ekonomi dari polusi udara di Jakarta diestimasikan sebesar US\$2,3 miliar atau Rp35,1 triliun dalam setahun terakhir.

Nilai kerugian tersebut dinilai lebih tinggi dari sejumlah kota lain di dunia. Polusi udara di Indonesia mampu memangkas 1,4 tahun dari usia kehidupan rata-rata penduduk. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mewacanakan membentuk Pansus Polusi Udara. Upaya ini, jelasnya, krusial guna memperoleh solusi yang tuntas dengan melibatkan sejumlah komisi di DPR beserta mitra kerja terkait.

"Teman-teman komisi lain setuju, kok, kita bikin pansus biar pemerintah serius. Karena apa? karena ini menyangkut nyawa, menyangkut kita semua, menyangkut anak cucu kita," ujar Charles. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan, wacana pembentukan pansus perlu disampaikan karena polusi udara menyangkut keselamatan bersama. Namun, dirinya melihat belum ada keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi



FOTO:ARIEF/NR

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.

udara. Sebab, menurutnya, setiap kementerian/lembaga seperti menjalankan kebijakannya sendiri-sendiri tanpa bersinergi satu sama lain.

Kepada *Parlementaria*, ia menyampaikan, ada empat poin kesepakatan terkait penanganan polusi udara. Pertama, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama kementerian/lembaga lain meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menangani dampak polusi udara terhadap kesehatan, khususnya mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu.

Kedua, Komisi IX DPR meminta Kemenkes menguatkan database pemantauan kualitas udara. Ketiga, Kemenkes melakukan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan. Terakhir, Komisi IX DPR meminta Kemenkes mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara melalui pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan SDM kesehatan.

## Jangan Diam

Senada, Anggota Komisi IV

DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah serius mengatasi persoalan itu. Ia merasa, polusi udara yang meningkat terus setiap tahun membuktikan Pemerintah Indonesia belum serius menangani isu tersebut.

Hal tersebut terlihat dari belum efektifnya penegakan aturan terkait penerapan baku mutu udara ambien nasional, yang menyebabkan pencemaran lingkungan tinggi dan berimplikasi pada kerusakan jangka panjang. "Bagi saya persoalan polusi udara ini tidak bisa diselesaikan dengan cara instan namun harus berkelanjutan dan memerlukan upaya masif dari segala pihak. Pemerintah harus menjadi pelopor untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kebersihan kualitas udara," tegasnya.

Politisi Fraksi PKS itu meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi yang mengatur secara komprehensif unsur pencemar yang berbahaya dan beracun di udara, serta memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. "Sesuai dengan mandat konstitusi kita bahwa negara harus menjamin atas hak warga negara atas kelangsungan hidup yang layak dan kualitas kehidupan yang baik," imbuh Johan. — ts/mh

# Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 pada tanggal 29 Agustus 2023 lalu. Dalam momen tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan berbagai capaian DPR, termasuk bagaimana dewan banyak menerima aduan dari rakyat.



FOTO: DEP/IR

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato terkait Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

**P**ada Rapat Paripurna Khusus Tahun 2022-2023 tentang Penyampaian Laporan Kinerja, Puan mengungkapkan bahwa DPR telah mendapatkan ribuan aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan kepada alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat Paripurna HUT ke-78 DPR digelar di kompleks parlemen, tepat di HUT, Selasa (29/8/2023) lalu. Peringatan HUT DPR kali ini dihadiri Ketua DPR RI Ke-15 Akbar Tanjung, Ketua DPR RI Ke-16 Agung Laksono, dan Ketua DPR RI Ke-17 Marzuki Alie.

Selain pimpinan DPR dari masa ke masa, turut hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Hakim Agung Syamsul Maarif, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai. Puan menjelaskan, sejak 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR telah

menerima 4.603 aduan rakyat melalui surat fisik dan 255 surat melalui website. Dengan begitu, Puan berujar bahwa DPR selalu berusaha menjalankan amanat rakyat dalam menyerap seluruh aspirasi.

"Terdapat 5 bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat, yaitu hukum, HAM dan keamanan, pertanahan dan reformasi agraria, perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN, ekonomi keuangan serta Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM," ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Mengusung tema 'DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju' pada HUT ke-78, DPR memiliki sejumlah capaian. Puan merinci beberapa capaian dewan dalam masa kerja tahun 2022-2023, termasuk dalam fungsi legislasi di mana DPR telah sukses

menyelesaikan 23 rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang.

"Kemudian 16 rancangan undang-undang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I, sebanyak 5 RUU diantaranya adalah RUU kumulatif terbuka dan 46 RUU sedang dalam tahap penyusunan. Sebanyak 29 RUU di antaranya adalah RUU kumulatif terbuka," jelas mantan Menko PMK itu.

Dalam proses pembentukan undang-undang, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, dan diskusi. Soal perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 130 perkara pengujian UU sepanjang

tahun sidang 2022-2023. Dari jumlah tersebut, kata Puan, hanya 13 perkara yang putusannya dikabulkan oleh MK.

"Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara," tegasnya. Sementara kinerja anggaran, Puan melaporkan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.

Puan menyebut, APBN sebagai instrumen keuangan negara telah bekerja keras dalam menggerakkan perekonomian nasional, memberikan perlindungan sosial, dan menjalankan pemulihan ekonomi nasional. "Perekonomian Indonesia tahun 2022 dan 2023, menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah pemulihan sosial-ekonomi nasional dan tantangan global. Hal ini merupakan hasil kerja bersama DPR RI dan pemerintah dalam menyusun UU APBN beserta kebijakan fiskalnya," ungkap Puan.

Terakhir, kinerja pengawasan DPR telah melakukan pengawasan



FOTO: KRESNO/ANR

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan buku laporan kinerja DPR RI selama tahun sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan UU yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat. "Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui rapat-rapat di gedung DPR maupun kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri.

"Serangkaian kegiatan diplomasi yang dilakukan DPR RI adalah memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi

Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global," papar cucu Bung Karno tersebut.

Usai penyampaian pidato, Puan lalu menyampaikan buku laporan kinerja DPR kepada ke ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua KY Amzulian Rifai, pimpinan MPR RI yang diwakili Ahmad Basarah, pimpinan DPD RI Nono Sampono, dan Hakim Agung Syamsul Maarif yang mewakili MA.

ann/mh





# DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)



## Puti Guntur Soekarno

# Salurkan Beasiswa PIP di Jatim



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno saat menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi di Kota Surabaya.

**Cucu Presiden Soekarno, Puti Guntur Soekarno menyalurkan kepada 410 pelajar berupa beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Penyaluran beasiswa tersebut secara simbolis digelar di Rumah Susun Keputih sebagai bentuk kepedulian dirinya terhadap pendidikan anak di Kota Surabaya.**

**P**erlu diketahui, beasiswa PIP merupakan beasiswa yang diperuntukan bagi para pelajar yang berasal dari kategori keluarga miskin dan rentan miskin agar bisa tetap memperoleh layanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal, jalur non formal,

dan pendidikan khusus. Beasiswa ini diharapkan bisa mencegah pelajar dari putus sekolah.

"Saya dan kita semua berharap ke depan akan semakin banyak generasi yang berprestasi menguasai pengetahuan dan mempunyai karakter yang kuat, sehingga ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara akan

menjadi lebih baik lagi," ucap Puti.

Tidak hanya menyalurkan beasiswa di Kota Surabaya, ia pun menyalurkan beasiswa PIP kepada 600 pelajar di Kabupaten Sidoarjo. "Makanya, ada jalur aspirasi anggota DPR, PDI Perjuangan, jemput bola mengambil inisiatif seperti itu. Ini artinya PDI Perjuangan peduli dengan masalah pendidikan berkelanjutan," ungkap Anggota Komisi X DPR ini.

Pada Oktober 2023, lanjut legislator dapil Jatim I ini, akan ada tambahan penerima beasiswa lagi. Jumlahnya mencapai 17 ribu siswa. Puti mengaku, penyaluran PIP tersebut dibantu para relawan Garda Puti Soekarno, kelompok budayawan, dan satuan pendidikan di Surabaya dan Sidoarjo.  ts/mh

# Ravindra Airlangga

## Gelar Bimtek untuk Petani dan Penyuluh Pertanian



Anggota DPR RI Ravindra Airlangga saat menggelar bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian Wilayah Koordinasi Poltek Pengembangan Pertanian Bogor.

Politisi Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian wilayah Koordinasi Poltek Pengembangan Pertanian Bogor. Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan penyuluh dan kelompok tani se-Kabupaten Bogor ini, Ravindra mengingatkan pentingnya kelompok tani dan penyuluh pertanian dalam pengembangan usaha tani.

**“K**elompok tani, selain sebagai wahana belajar dan wahana bekerja sama, juga menjadi media dalam meningkatkan produktivitas usaha tani,” kata Ravindra. Sedangkan penyuluh pertanian, baginya adalah agen perubahan yang diharapkan merubah cara berpikir dan

bertindak para petani dalam tata cara bercocok tanam dan berproduksi dengan cara yang lebih baik.

Oleh sebab itu, Ravindra mengajak para penyuluh petani untuk mendampingi petani dalam membuat kelompok dan bahkan mengembangkan kelompok taninya. Pria yang memiliki perhatian lebih kepada regenerasi petani

ini mengingatkan peserta bahwa kelompok tani adalah alat perjuangan para petani dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan usaha tani. Dan penyuluh berperan penting dalam melakukan pendampingan petani secara individu maupun petani secara institusi melalui kelompok taninya.

Legislator Dapil Jabar V ini, berharap melalui Bimtek bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang semakin kuat kepada para penyuluh dalam meningkatkan peran kelompok tani. “Saya sangat berharap dengan Bimtek ini kapasitas sumberdaya manusia petani dan penyuluh pertanian semakin meningkat, karena penyuluh dan petani adalah aktor utama keberhasilan pembangunan pertanian,” ujar Anggota Komisi IV ini.

**bia/mh**

# Endang Setyawati Thohari

## Menggerakkan Kedaulatan Pangan di Cianjur



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Endang Setyawati Thohari saat memberikan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.

**Dalam upaya menyerap aspirasi dari para nelayan, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Endang Setyawati Thohari menggelar kunjungan ke Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Endang memberikan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup kepada masyarakat setempat.**

**D**ari penyuluhan ini, diharapkan dapat memberi pengetahuan soal bantuan bagi masyarakat agar dapat melaksanakan program dengan

benar dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami harapkan dengan adanya reses ini, warga di wilayah Cidaun dan Cianjur secara umum dapat lebih mengetahui soal perikanan

dan bantuan-bantuan yang ada di pemerintah," kata Endang.

Legislator Dapil Jabar III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu, berharap semua sektor, khususnya dalam bidang perikanan di Cianjur bisa bergerak untuk kedaulatan pangan, energi, dan air.

"Jadi program-program Kementerian Perikanan, KLHK, dan Kementerian Pertanian ini kami akan optimalkan demi kedaulatan pangan, energi, dan air khususnya di kabupaten Cianjur," ujar Anggota Komisi IV DPR itu.

— **ssb/mh**

## Sulaeman L Hamzah

# Bagikan Puluhan Traktor untuk Petani Merauke



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Sulaeman L. Hamzah saat foto bersama usai memberikan bantuan 53 alsintan di Merauke, Papua.

**Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L. Hamzah, menyerahkan 53 alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor tangan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) di Merauke, Papua Selatan, Agustus lalu.**

**S**ulaeman menjelaskan, proses pemberian bantuan ini dimulai dengan penyerapan aspirasi saat ia turun ke daerah pemilihan. Masyarakat banyak yang menginginkan bantuan alsintan untuk menunjang pertanian mereka. "Alsintan ini adalah aspirasi yang diproses mulai dari perekrutan kelompok hingga hari ini diserahkan.

Ini untuk memenuhi keinginan petani-petani Merauke," ujar Sulaeman.

Bantuan alsintan ini, lanjut Suleman, juga sejalan dengan proyeksi Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Ia berharap alsintan yang diberikan pada gapoktan bisa dipergunakan sebaik mungkin. Sulaeman mewanti-wanti agar alsintan ini bisa bertahan lama dan penggunaannya tidak boleh

dimonopoli segelintir orang.

"Saya ingatkan, kalau masih ada segelintir orang menggunakan alsintan secara pribadi, tak segan-segan kami tarik kembali. Bagi siapa saja yang menemukan, laporkan kepada saya. Kami bersama dinas pertanian akan ambil tindakan," tukasnya.

Sebelumnya, Sulaeman bekerja sama dengan Kementerian Pertanian menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pertanian perkotaan hidroponik kepada ibu-ibu di rumah aspirasinya. "Kita ingin memberikan bantuan pada masyarakat. Selain mendorong sektor pertanian skala besar, kita juga menggalakkan pertanian perkotaan hidroponik," ujar Sulaeman.  rnm/mh

## Anggia Erma Rini

# Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani Blitar



FOTO: IST/ANR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat menghadiri Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani Blitar

**Guna mendorong peningkatan petani Hortikultura di Blitar, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Wisata Kampung Coklat, Blitar, Jawa Timur.**

Kegiatan diikuti sekitar 100 orang perwakilan kelompok wanita tani dari Kecamatan Sanankulon dan Srengat tersebut juga menghadirkan narasumber Dosen Uniska Kediri Imam Habibi. Dalam sambutannya, Anggia mengatakan, Bimtek hortikultura yang berkelanjutan ini, bertujuan untuk peningkatan kapasitas pertanian, khususnya di sektor hortikultura. Harapannya, Kabupaten Blitar bisa

semakin berkembang.

"Dengan dorongan program Peekarangan Pangan Lestari (P2L), diharapkan para wanita tani dalam hal ini para ibu rumah tangga bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menanam sayuran buah - buahan dan lainnya. Baik itu tanaman sayur maupun buah-buahan dan tanaman produktif lainnya," tutur politisi PKB tersebut.

Anggia berharap, program P2L

ini, bisa berguna khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga maupun Kelompok Wanita Tani (KWT), dengan memfungsikan sekitar rumah masing-masing. Pemberian modal pada program P2L, bagi wanita tani bisa lebih optimal lagi dalam memanfaatkan pekarangan rumahnya. Dengan begitu, ada penghasilan tambahan yang didapat para ibu.

"Dari hasil pemanfaatan pekarangan tersebut sebagian bisa dijual, dan sebagian lainnya bisa dinikmati bersama kelompoknya masing-masing," terang politisi yang aktif memajukan petani ini. Program P2L menyediakan modal Rp50 juta untuk setiap kelompok tani. Ini bisa dimanfaatkan untuk membeli bibit beserta teknologi pertaniannya.

ann/mh

## Anita Jacoba Gah

# Jembatani Percepatan Pencairan Dana PIP di NTT



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah saat menghadiri kegiatan percepatan pencairan dana PIP di SD Masehi Elopada Kabupaten Sumba Barat Daya.

**Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah mengupayakan percepatan pencairan dana Program Indonesia Pintar di Nusa Tenggara Timur. Anita hadir sebagai jembatan antara pihak penerima dana, sekolah, dan perbankan yang menjadi penyalur dana tersebut.**

**M**enurutnya, terdapat dua masalah besar pada pencairan dana PIP di NTT, yaitu ketidaktahuan orang tua, bahkan pihak sekolah terkait penyaluran dana PIP. Masalah lain yang sering menjadi batu sandungan

adalah rumitnya teknis pencairan di bank yang kadang membutuhkan persyaratan yang sebenarnya tak diperlukan.

"Ketidaktahuan orang tua banyak dana anggaran yang kembali ke kas negara. Akhirnya, NTT sendiri 2021 ada Rp5 miliar untuk 2022 sendiri ada

Rp7,8 miliar. Karena hambatan itu maka saya melakukan percepatan pencairan dimana kita panggil orang tua siswa dan pihak bank. (dana PIP) dicairkan di situ, di depan mata," ujar legislator Dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

Selama Juli-Agustus, Anita menyelenggarakan percepatan pencairan dana PIP di beberapa lokasi di Pulau Sumba, Pulau Sabu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Kegiatan ini melibatkan orang tua siswa dari tingkatan SD, SMP, dan SMA, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta.  uc/mh

## Nevi Zuairina

# Distribusikan Paket Sembako



FOTO: IST/AR

Anggota DPR RI Nevi Zuairina saat memberikan bantuan program paket sembako di Sumatera Barat.

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Nevi Zuairina memberikan bantuan program paket sembako di delapan kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar). Paket ini didistribusikan untuk membantu masyarakat agar bisa bangkit kembali dari pandemi Covid-19.**

**D**elapan kabupaten/kota yang mendapat distribusi sembako itu adalah Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, Pariaman, dan Payakumbuh. Program tersebut bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Paket sembako yang dibagikan melibatkan berbagai komponen yang mencakup bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan dasar lainnya. Tidak semua lengkap, tapi akan diperluas jangkauannya sehingga banyak masyarakat yang mendapatkannya," ujar Nevi yang juga Anggota Komisi VI ini.

Dampak pandemi Covid-19

selama dua tahun lebih menimpa masyarakat, membuat sejumlah kabupaten/kota belum sepenuhnya pulih. Program bantuan paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi yang mendera masyarakat. Nevi menambahkan, pembagian sembako ini juga akan menjaga ketersediaan pangan. Ia ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki akses pangan yang cukup dan terjangkau, terutama dalam situasi sulit seperti pasca pandemi covid-19 ini.

"Program ini juga merupakan wujud keterlibatan aktif kami sebagai anggota DPR dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat yang kami wakili. Dengan cara ini pula saya dapat berinteraksi langsung dan mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka," ungkap legislator dapil Sumbar II ini.  gal/mh

Alimin Abdullah

# Serahkan Bantuan Alat Berat



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Alimin Abdullah saat menyerahkan bantuan alat berat untuk kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Makmur Mandiri Jaya di Desa Sekipi, Lampung Utara.

**Anggota DPR RI Alimin Abdullah menyerahkan bantuan alat berat untuk kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Makmur Mandiri Jaya di Desa Sekipi, Lampung Utara, Lampung. Bantuan tersebut berupa excavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bantuan diserahkan melalui Wakil Bupati Lampung Utara.**

**“A**lhamdulillah, hari ini saya berhasil memperjuangkan bantuan excavator dari KKP untuk Pokdakan Sekipi Makmur Jaya, agar ke depan bisa menjadi lebih berkembang,” ujarnya. Menurutnya, Pokdakan Sekipi Makmur Jaya merupakan kelompok tani dan ikan pertama yang berhasil mendapat bantuan excavator dari KKP.

Legislator Lampung II ini berharap, ke depan sektor budidaya ikan nila dan sektor perikanan lainnya di desa tersebut semakin berkembang dan membawa perubahan bagi Lampung Utara. Lebih dari itu, pihaknya juga berharap ke depan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan lahannya tidak hanya sekedar menanam singkong atau kopi saja, melainkan juga harus mampu mengalihfungsikan lahannya ke sektor perikanan.

Pasalnya, saat ini usaha perikanan di daerah tersebut sangat menjanjikan, sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan roda perekonomian masyarakat. Dalam kesempatan itu, Alimin mengapresiasi masyarakat Desa Skipi yang sudah mulai beralih ke sektor perikanan. Ia berharap bantuan excavator dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Saya sangat apresiasi masyarakat Desa Sekipi yang sudah mulai berkembang dengan memanfaatkan lahannya beralih ke sektor perikanan yang saat ini sudah hampir 30 hektar diubah menjadi kolam ikan nila. Mudah-mudahan bantuan excavator ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi meningkatkan usaha bersama, agar ke depan hidup bisa semakin sejahtera dan makmur,” ungkap Alimin. — ayu/mh

## Nurhayati Effendi

# Berbagi Tips Wirausaha ke Mahasiswa UPI Tasikmalaya



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Nurhayati Effendi usai memberikan edukasi berwirausaha ke mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia di GOR Susi Susanti Tasikmalaya.

**Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Nurhayati Effendi membagikan pengalaman berwirausaha ke ratusan mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di GOR Susi Susanti Tasikmalaya, Agustus lalu.**

**“S**aya sangat senang bisa bertemu dengan adik-adik semua, sebagai harapan generasi emas dan bukan generasi cemas. Saya mengajak kepada adik-adik mahasiswa baru UPI

Tasikmalaya, fokus pada tujuan kita agar siap terhadap apapun yang terjadi, termasuk menjadi seorang future leaders yang salah satunya adalah menjadi entrepreneur,” ucap Nurhayati.

Nurhayati juga mengatakan, edukasi dan sosialisasi untuk anak

muda berani membuat usaha dan membuka lapangan pekerjaan harus terus dilakukan. Menurutnya, hal tersebut dapat membantu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia yang masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang.

Lebih lanjut, Nurhayati menceritakan pengalaman dalam berbisnis serta kiat-kiat menjadi pebisnis muda yang tangguh, inovatif, dan kreatif. Ia mengajak para Gen Z untuk mulai berkecimpung dalam dunia bisnis. **rmm/mh**



JJ Rizal

## Masa Depan Adalah Negeri Yang Tak Memiliki Peta

**“Ada yang bilang hidup memang dijalani ke depan, tapi kan dipahami ke belakang. Kita enggak bisa hidup hari ini ke masa depan dengan mata yang buta. Karena kalau kita mau punya penglihatan ke masa depan, kita harus pergi ke masa lalu.”**

**P**erjalanan mencintai sejarah JJ Rizal bermula dari kesenangannya pada ‘tukang cerita’ yang ada di hampir semua masyarakat etnik di Indonesia. Seperti sahibul hikayat dalam tradisi Betawi, tukang turi-turian di kebudayaan

Batak, dan bungklung dari Bali. Ia menyukai tukang cerita, karena bisa membawakan cerita-cerita ajaib yang membuat dirinya kemudian banyak membaca buku dan majalah.

“Saya rasa kehidupan manusia itu sangat ajaib ya, lebih ajaib dari fiksi gitu dan itulah yang kemudian

bikin saya, oh pasti sejarah kehidupan manusia itu banyak yang ajaib. Maka, saya mulai baca kehidupan manusia di masa lalu dan ya memang benar ajaib-ajaib,” ungkapnyanya kepada *Parlementaria*.

Argumen lain yang membuka keinginannya belajar sejarah adalah

bahwa untuk menuju ke masa depan, tidak dapat dengan mata buta. Maka untuk melihat ke masa depan, harus pergi ke masa lalu. "Karena masa depan, kan, negeri yang enggak ada petanya. Nah, gimana cara punya peta ke masa depan? Ya, mengetahui masa lalu, itu alasannya saya belajar sejarah," tuturnya.

Kesenangannya dalam mempelajari masa lalu, dituangkannya dalam tulisan, seperti biografi seseorang dan yang unik juga mengenai riwayat makanan Indonesia. Salah satu buku seputar makanan, yang ia sunting kembali, yakni salah satu buku resep masakan Indonesia warisan Soekarno yang berjudul 'Mustika Rasa'.

Ia melihat problem *climate change* yang menjadi persoalan terbesar di seluruh muka bumi saat ini berkorelasi dengan krisis pangan. Tak hanya itu permasalahan mengenai makanan di Indonesia juga ada pada tingginya angka *stunting* dan gizi buruk. Budaya makan masyarakat Indonesia yang terjadi dalam periode panjang saat ini juga

dinilai membuat kerusakan.

Untuk itu, ia menyunting kembali buku 'Mustika Rasa' yang dibuat oleh Presiden Soekarno pada tahun 1967. Rizal menceritakan bila Soekarno pada tahun tersebut memaksa untuk menerbitkan buku Mustika Rasa, karena menurut dia Indonesia saat itu harus punya satu politik pangan yang bisa menggaransi satu kedaulatan pangan.

"Jadi kemerdekaan kita itu harus dimulai dari kemerdekaan di lidah, katanya. Kalau lidah kita terjajah, maka seluruh total kita akan terjajah. Misalnya, bagaimana kita ini bukan pemakan gandum, tapi tiap hari kita makan roti, kita menjadi pengimpor gandum paling besar. Padahal, negara ini enggak ada tempat yang bisa menumbuhkan gandum," jelasnya.

Melihat riwayat makanan di Nusantara, yang memiliki penduduk bhinneka dan keragaman pangan dari masing-masing daerah, ia menilai, Indonesia perlu belajar untuk memahami keanekaragaman pangan pokok setiap daerah, sehingga tidak



FOTO: IST/NR

JJ Rizal menyukai tukang cerita.

terus mengandalkan beras atau nasi.

"Jadi enggak bisa semua di Jawa-kan, jadi harus ada yang makan sagu, ya udah dihormati makan sagu, makan sorgum, makan cantel, makan jawawut, makan singkong. Dan itu harus belajar, kalau kita terus mengandalkan makan nasi, kita enggak akan pernah mencukupi. Jadi, keanekaragaman pangan pokok itu menjadi penting," ujarnya.

Dalam melestarikan sejarah, Rizal juga membangun sebuah lembaga riset dan penerbitan bernama Komunitas Bambu atau Kobam yang secara khusus menggarap buku-buku bertema sejarah. Kobam didirikan pada tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi dan politik. Rizal sendiri, menilai sebagai krisis identitas. Lantaran banyak orang Indonesia yang tidak tahu tentang jati dirinya, seperti orang yang mengaku Indonesia tapi perilakunya peodal dan melakukan korupsi.

"Padahal itu semua nilai yang bertentangan dengan nilai orang Indonesia. Anti demokrasi, fasistik, kaya gitu itu bertentangan. Nah, jadi krisisnya menurut saya adalah krisis ketidaktahuan tentang apa itu Indonesia dan caranya cuma satu, pulang ke rumah sejarah," tuturnya.

gal/mh



FOTO: IST/NR

JJ Rizal saat podcast di Radio Parlemen.

# POR DPR RI

## Menjaring Bibit Baru Olahraga



FOTO: RUMAH/IR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka POR Korpri Setjen DPR RI di Lapangan Taman Jantung Sehat.

*Men sana in corpore sano*, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan itulah yang terus dipegang dan ditanamkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Tak berlebihan jika kemudian Korpri Setjen DPR RI mewujudkan budaya hidup sehat, salah satunya melalui Pekan Olahraga (POR).

Ketua Korpri Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko menjelaskan, sejatinya POR merupakan salah satu ajang untuk mencari bibit baru di bidang olahraga yang ada di Setjen DPR RI. Sehingga, nanti bisa dilakukan pembinaan, hingga pada akhirnya akan bisa mewakili Setjen DPR dalam even Pekan Olahraga

Nasional (Pornas) Korpri.

Ditambahkan Djaka, POR di Setjen DPR RI ini sudah ada sejak lama, jauh sebelum pihaknya memimpin organisasi pegawai negeri di Setjen DPR RI. Melihat manfaatnya yang cukup banyak, salah satunya sejalan dengan visi Sekjen DPR meningkatkan budaya hidup bugar, maka di bulan Agustus 2023, Korpri Setjen DPR RI kembali

menggelar POR setelah enam tahun vakum.

"POR sendiri selain untuk membiasakan hidup sehat, juga sebagai salah satu ajang memperingati HUT RI, HUT DPR RI, dan HUT Korpri, untuk mencari bibit baru di bidang olahraga. Selain itu, meningkatkan kekompakan, dan solidaritas antara sesama rekan kerja di Setjen DPR RI. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk menjaring bibit muda di bidang olahraga yang nanti akan terus dibina, hingga mampu mewakili Setjen DPR RI dalam Pornas Korpri yang digelar setiap dua tahun sekali," jelas Djaka kepada *Parlementaria*.

Kepala Pusat Teknologi dan Informasi (Kapustekinfo) Setjen DPR RI ini memaparkan bahwa dari tahun



ke tahun cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan berbeda. Namun, dalam POR kali ini yang bertema Wujudkan Visi Setjen DPR RI lewat aparatur kecil Negara yang sehat, bugar, aktif, dan inovatif dengan semangat Pancasila ini, dipertandingkan sembilan cabor (sebelumnya tujuh, ditambah dua cabor lainnya).

Bahkan, untuk mendukung kebugaran tubuh dan semangat berolahraga seluruh anggota, pegawai dan karyawan di DPR RI ini, Sekjen DPR RI merenovasi sport center di lingkungan DPR RI menjadi lebih lengkap dalam peralatan dan fasilitasnya, serta lebih representatif. Sebut saja, gym area, lapangan badminton, lapangan futsal, lapangan tenis, dan lapangan basket.

"Aspirasi dari seluruh peserta Korpri yang sejalan dengan visi dari Pak Sekjen. Alhamdulillah, Pak Sekjen merespon, hingga akhirnya terwujudlah sport center DPR RI seperti saat ini. Meski demikian, harus diingat juga sport center ini



FOTO: RUMI/ANR

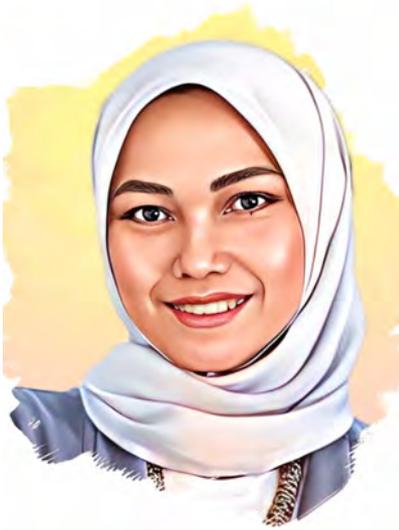
Ketua Korpri Setjen DPR RI Dika Dwi Winarno saat menghadiri pembukaan POR Korpri Setjen DPR RI di Lapangan Taman Jantung Sehat.

bukan hanya untuk peserta Korpri atau PNS (pegawai negeri sipil) saja, namun juga untuk anggota DPR RI pastinya, dan seluruh karyawan non PNS lainnya yang ada di lingkungan

Setjen DPR. Kami berharap fasilitas sport center tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga atau dirawat dengan baik," paparnya.

ayu/mh





Oleh:  
**dr. Cut Warnaini, MPH**  
Dosen Universitas Mataram

**P**olutan berbahaya yang menyebar pada udara tersebut, yaitu logam berat, karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO), ozon (O<sub>3</sub>), senyawa organik volatil (VOC), dan sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>). Keadaan penumpukan senyawa-senyawa polutan yang kerap disebut sebagai polusi tersebut, kini seiring waktu menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan polusi tertinggi di dunia. Ini secara tidak langsung mengancam kondisi kesehatan warga yang tinggal pada area-area padat atau kota-kota besar.

Disebutkan dalam website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa ada berbagai dampak kesehatan yang dapat dikaitkan dengan polusi udara, yakni :

1. Timbul flek pada kulit, kerap kali disebabkan oleh polutan hidrokarbon (HC) dan sulfur oksida (SO<sub>2</sub>).
2. Batuk dan timbul asma. Pada mekanisme pertahanan tubuh sendiri "batuk" merupakan salah satu

## Menjaga Kesehatan Tubuh dari Polusi

Polusi udara di kota-kota besar, seperti di DKI Jakarta menimbulkan permasalahan kesehatan yang perlu diwaspadai. Ancaman polusi udara yang kian hari kian menyeruak disebabkan oleh peningkatan penggunaan bahan bakar dengan emisi yang mengotori udara, baik dari pabrik, kendaraan bermotor, bahan-bahan yang mengandung aerosol, serta berbagai kegiatan rumah tangga yang menggunakan listrik.

mekanisme untuk mengeluarkan benda asing dari dalam tubuh yang masuk melalui saluran pernapasan atau melalui mulut. Polutan yang terkandung dalam polusi pun dapat menyebabkan batuk, bahkan disebutkan hidrokarbon (HC) dan sulfur oksida (SO<sub>2</sub>) sendiri tidak hanya berdampak pada kulit, namun dapat menyebabkan asma. Polutan-polutan tersebut lama kelamaan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan.

3. Pada mata, polusi udara dapat berdampak pada iritasi dan peradangan mata yang akan menyebabkan ketidaknyamanan pada pandangan.
4. Polusi udara pun dapat menyebabkan kulit menjadi bersisik dan gatal, sehingga kerap kali akan mempermudah transmisi penyakit-penyakit kulit karena adanya iritasi akibat garukan.
5. Pada anak, kandungan timbal pada polusi udara yang masuk melalui saluran pernapasan, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
6. Jika permasalahan polusi udara ini tidak tertangani dengan baik, dampak buruknya adalah risiko kanker paru-paru. Hal ini



dalam jumlah tertentu dapat memicu terjadinya perubahan struktur dan fungsi sel dan menjadi faktor pemicu keganasan.

Melihat banyaknya permasalahan kesehatan yang dapat terjadi diakibatkan oleh polusi udara, maka penting bagi masyarakat di perkotaan mengetahui bahaya polusi udara bagi kesehatan, sehingga dapat melakukan pencegahan atau proteksi pada diri. Dengan berbagai pemberitaan selama ini, kadar polusi udara di Kota Jakarta sendiri masih sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, pemerintah sendiri telah menerapkan berbagai cara untuk melindungi warga negaranya dari



**Melihat banyaknya permasalahan kesehatan yang dapat terjadi diakibatkan oleh polusi udara, maka penting bagi masyarakat di perkotaan mengetahui bahaya polusi udara bagi kesehatan, sehingga dapat melakukan pencegahan atau proteksi pada diri.**

polusi udara ini.

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) oleh pemerintah, sehingga hujan akan turun untuk mengurangi polutan di Kota Jakarta. Berkaca pada teknologi yang telah diaplikasikan oleh Cina, Korea Selatan, Thailand, dan India ini, pemerintah berharap TMC dapat menurunkan tingkat polusi di Kota Jakarta. Meski demikian, beberapa ahli masih menjadikan hal ini sebagai pro dan kontra, menimbang bahwa tujuan awal dari teknologi ini sendiri tidaklah ditujukan untuk polusi, melainkan untuk mengatasi kemarau panjang atau kekeringan dan kebakaran hutan yang sulit dipadamkan.

Perhatian pemerintah telah sepenuhnya diarahkan pada kondisi polusi udara tersebut, oleh sebab itu warga sendiri harus melakukan proteksi diri sendiri. Pengurangan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat yang menghasilkan emisi berbahaya untuk udara merupakan kunci utama. Namun, tidak hanya itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dari polusi udara, yaitu :

1. Mengurangi aktivitas di luar ruangan. Modifikasi kegiatan agar lebih banyak melakukan kegiatan indoor, misalnya dengan melakukan olahraga di dalam ruangan, menghabiskan lebih banyak waktu di dalam kantor dan usahakan tidak terpapar udara luar. Usahakan berbelanja dengan cepat atau memanfaatkan belanja online dan pengantaran online sehingga

mengurangi jumlah paparan terhadap udara luar. Namun, jika sangat dibutuhkan untuk keluar rumah kenakanlah masker dan kacamata untuk melindungi wajah, saluran pernapasan, dan mata.

2. Lebih memanfaatkan penggunaan transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi. Hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi emisi yang dapat menyebabkan peningkatan kadar polusi udara.

3. Segera membilas seluruh tubuh atau mandi setelah melakukan perjalanan dari luar rumah, serta gantilah pakaian segera. Diharapkan dengan melakukan hal tersebut, partikel-partikel yang menempel pada tubuh dan pakaian dapat dieliminasi dengan segera dan tidak akan mengendap sehingga menyebabkan permasalahan pada kesehatan.

4. Gunakan air humidifier atau penetril udara di dalam rumah untuk menetralkan udara yang ada di dalam rumah.

5. Mencoba memodifikasi hobi dengan menanam tanaman di dalam rumah. Ada berbagai tanaman yang dapat menghasilkan oksigen di dalam ruangan, seperti tanaman sirih gading, lidah mertua, sri rejeki, dan berbagai tanaman lainnya.

Dengan melaksanakan pola hidup sehat, diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi kesehatan tubuh dari polusi udara. Mari terapkan sekarang dan jadikan Indonesia lebih baik. 🌿

# Mansion Tjong A Fie

## Rumah Orang Kaya Medan Tempoe Doeloe

**Sejarah Indonesia tak terlepas dari peran manusia-manusia di dalamnya, baik warga lokal maupun pendatang. Termasuk imigran asal Tiongkok, Tjong A Fie, yang rumahnya menjadi destinasi wajib bagi pelancong yang berkunjung ke Medan. Bekas rumah 'orang kaya Medan' ini telah berubah menjadi museum dengan koleksi dan kenangan ibu kota Sumatera Utara ini pra Republik.**

Jika Kota Medan diibaratkan badan manusia, maka daerah Kesawan merupakan jantung kota ini. Dengan nadinya Sungai Deli yang membelah kota metropolitan di pesisir timur Sumatera tersebut. Rumah milik Tjong A Fie, orang kaya Medan "tempoe doloe" ini berdiri di tengah jantung Kota Medan.

Rumahnya bercorak unik, meski dominan dengan budaya Tiongkok, namun terdapat pula nuansa Eropa dari pilar rumah dan melayu lewat ornamen jendela-jendela besarnya. Inilah bentuk akulturasi yang terjadi sejak rumah ini dibangun di akhir abad ke-19.

Dengan bekal tiket seharga Rp35 ribu, pengunjung dapat berkeliling

dalam rumah yang telah jadi museum ini. Berdiri di atas tanah seluas 8.000 meter persegi, rumah terdiri dari dua lantai, dengan 35 kamar. Bisa dibayangkan kemegahan rumah ini pada zamannya. Bahkan, untuk ukuran zaman sekarang, rumah ini sangat besar dan mewah. Pantaslah rumah ini juga disebut sebagai mansion. Hanya saja topografi daerah Kesawan berubah dengan dipenuhi ruko-ruko, menutupi dari jauh citra rumah ini.

Tapi, saya pastikan ketika kita melihat dari pagar depan, mata pasti akan terpapar keeksotisan bangunan jadul ini. Serasa punya daya magis, rumah pengusaha besar ini menarik rasa penasaran untuk berada di dalamnya. Ketika saya memasuki rumah ini seolah melewati lorong waktu ke tahun dimana Medan masih



Keluarga Tjong A Fie. FOTO: AHA



Lampion dalam Mansion. FOTO: AHA



Mansion dari udara. FOTO: AHA

dikuasai oleh tangan-tangan kolonial. Kesawan waktu itu jadi denyut nadi perdagangan, namun bangunan yang tumbuh di dalamnya belum semekar dan sepadat ini.

### Kaya dan Dermawan

Sebelum itu, ada baiknya kita berkenalan dengan Tjong A Fie. Sebagai museum, mansion ini menerangkan dengan cukup baik siapa pengusaha Tionghoa itu. Ia adalah seorang pengusaha, bankir dan kapitan Tionghoa yang berasal dari Meixian, China daratan. Berkat bisnis yang ia bangun sejak merantau tahun 1875 itu, ia pun menjadi kaum terpadang di kota ini.

Bolehlah kita sebut, ia socialite terkemuka di Medan kala itu. Dalam keterangan di museum, A Fie kenal dekat dengan para pejabat kolonial bahkan bisa berkontak langsung dengan Sultan Melayu Deli saat itu Sultan Ma'moen Al Rasyid. Dengan portofolio itu, ia dinobatkan sebagai kapitan, semacam posisi kepemimpinan bagi komunitas tionghoa di Medan.

Tak heran, reputasi dan status sosial itu diperoleh karena gurita bisnisnya yang hampir di segala bidang seperti pabrik minyak kelapa sawit, pabrik gula, bank, dan perusahaan kereta api. Bahkan, A Fie diketahui memiliki lebih

dari 10.000 karyawan. Legenda kekayaannya juga tak kalah dengan cerita kedermawanannya. Dikisahkan bahwa A Fie selalu menyisihkan 5% dari keuntungannya untuk dibagikan kepada seluruh karyawannya. Bahkan, ia turut berdonasi dalam pembangunan rumah sakit, rumah ibadah seperti kuil Hindu dan Buddha di Medan, hingga balai kota Medan..

### Mansion Multikultur

Masuk ke mansion ini pengunjung akan melalui pintu utama kayu besar. Di ruangan utama inilah Tjong A Fie menerima tamu terhormat. Aula utama didekorasi dengan indah dengan dinding berpanel kayu berlapis emas dari lantai ke langit-langit yang diukir indah dalam gaya Tiongkok. Ruang samping yang mengapit ruang utama adalah ruang dengan dekorasi gaya melayu dan ruang bergaya Tiongkok.

Di luar halaman terbuka terdapat sedikit taman. Pengunjung dapat melihat ke dalam tempat suci menuju tempat sembahyang keluarga. Keturunan Tjong A Fie hingga saat ini masih menggunakannya untuk mendoakan leluhur mereka pada hari pertama dan kelima belas penanggalan lunar. Tempat sembahyang itu diapit dua ruangan besar dan panjang. Salah satunya adalah kamar tidur mendiang yang

memamerkan tempat tidur kayu mahoni berukir asli, pakaian sutra, dan artefak dari zaman tersebut.

Saat ini, meski telah tiada, warisan Tjong A Fie dengan rumahnya jadi landmark budaya bagi warga Medan. Bangunan ini penanda bahwa kota ini sudah metropolis sejak zaman dahulu, dengan multikulturalisme yang tercermin sejak masa lampau hingga kini. — aha/mh



Mansion tampak depan. FOTO: AHA

## Iskan Qolba Lubis Baca Buku dan Wisata Sejarah Dunia

Tetap menekuni hobi di sela-sela padatnya kesibukan tidaklah mudah. Terlebih hobi yang membutuhkan konsentrasi dan penghayatan tinggi. Yaitu, membaca buku dan wisata sejarah negara-negara di dunia. Namun, bagi Iskan Qolba Lubis, menjalani dua hobi ini di tengah padatnya agenda bukanlah hal yang sulit.

**"S**aya biasa membaca buku saat pagi atau malam hari setelah beraktivitas. Bahkan, di mobil, pesawat, saya kerap membawa buku dalam perjalanan. Saya sudah terbiasa bawa buku ke mana-mana sejak kuliah di Mesir," ujar Iskan.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini, mengakui, di antara banyaknya

genre buku yang dia sukai adalah buku bertema sejarah dan filsafat. Ia semakin menyukai hobi membaca saat di Mesir, karena di negara tersebut buku-buku dijual dengan sangat murah..

Bahkan, di Mesir sangat lazim melihat banyak orang yang membaca buku. Baik di bis, di halte, dan di manapun. "Jadi, negara Mesir sangat bagus secara literasi," ujar politisi Fraksi PKS ini. Ia menjelaskan,

karena dirinya rutin mengoleksi buku-buku bertema filsafat dan sejarah, maka hingga kini lebih dari 1.000 buku yang ia miliki.

Beberapa buku agama, seperti Kitab Shahih Bukhari, berjilid-jilid ia miliki. Ia meyakini dengan tekunnya membaca banyak buku sejarah dan filsafat dunia, akan semakin mudah dan objektif dalam menilai suatu peradaban serta budaya suatu negara.

"Umpamanya, kenapa sih ada suatu negara yang meyakini LGBT? karena ini juga tidak terlepas dari sejarah filsafat orang-orang di negara tersebut. Misalnya, Amerika itu negara liberal, urusan pribadi tidak bisa urusan negara. Jadi, kalau kita tahu alur berpikirnya, tahu sejarah bangsanya, kita akan lebih objektif menilainya," jelas mantan Pimpinan Komisi VIII DPR RI ini.  rdn/mh

# Diplomasi Es Doger

Indonesia dikenal kaya kuliner. Ragam makanan dan minuman khas daerah kerap tersaji dalam acara-acara kenegaraan. Kuliner juga kerap dijadikan wahana diplomasi informal antarpemimpin negara atau parlemen.



FOTO: FARHAN/NR

Ketua DPR RI sekaligus Presiden AIPA tahun 2023, Puan Maharani saat menghadiri Gala Dinner di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

**D**engan kuliner khas daerah ini, selain bisa dijadikan objek promosi ke mancanegara, juga bisa menjadikan diplomasi kian humanis, penuh keakraban. Inilah yang terlihat pada penyelenggaraan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di Jakarta. Pada jamuan makan, terlihat ada es doger yang mungkin tidak populer di mata para delegasi. Rasanya yang manis dan tersaji dingin, sangat menyegarkan saat diteguk.

Es doger yang menyejukkan suasana, jadi pembuka AIPA. Inilah "diplomasi es doger" yang tersaji. Selain es doger ada soto lamongan yang juga jadi menu AIPA kali ini. DPR RI, memang, ingin menampilkan wajah Indonesia yang orisinal lewat kulinernya. Dengan ragam kuliner Nusantara, mata dunia diharapkan kian tertuju pada Indonesia sebagai

destinasi wisata internasional.

Pada Gala dinner yang diselenggarakan Ketua DPR RI RI Puan Maharani itu, digelar pula pentas budaya. Bertempat di Hotel Mulia, Jakarta, ada tari Tarek Pukat dari Aceh dan tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Bahkan, musik angklung pun tersaji menyemarakkan pembukaan AIPA pada 7 Agustus lalu itu.

Delegasi AIPA tampak terpesona dengan keindahan budaya Indonesia, apalagi para penampil banyak yang mengenakan pakaian tradisional. Ada yang memakai baju tradisional Ternate, Maluku Utara, hingga pakaian adat Bali dan Jawa. "Selamat datang di Gala Dinner Sidang Umum AIPA ke-44, yang mengangkat tema persahabatan, ekonomi biru, dan keamanan maritim," kata Puan menyambut para delegasi Sidang Umum AIPA. — rdn/mh



## The 9th MIKTA Speakers' Consultation

“Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges”



**20 November 2023**



**Jakarta - Indonesia**

